



**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA TRANSFER
PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN (SAMISAKE) PROVINSI
JAMBI TAHUN ANGGARAN 2012 PADA KEGIATAN BEDAH RUMAH**
(Studi di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

ATIKA AYU PRATIWI
NIM. 135030101111146



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2017



DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kontribusi Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kebijakan Publik.....	13
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	13
2. Bentuk-Bentuk Kebijakan Publik.....	14
3. Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik.....	15
B. Implementasi Kebijakan Publik.....	16
1. Definisi Implementasi Kebijakan Publik.....	16
2. Model Implementasi Kebijakan Publik.....	17
3. Model Analisis Implementasi Kebijakan Grindle.....	24
4. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan.....	30
C. Teori Pembangunan.....	31
1. Paradigma Pembangunan.....	35
D. Teori Pembangunan Lain-Lain.....	43
1. Teori Pemberdayaan.....	43
2. Teori Kesejahteraan Masyarakat.....	47
3. Teori Ketergantungan.....	48
E. Program SAMISAKE.....	50



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	54
B. Fokus Penelitian.....	55
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	59
D. Jenis dan Sumber Data.....	59
E. Teknik Pengumpulan Data.....	60
F. Instrumen Penelitian.....	63
G. Analisis Data.....	64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Situs dan Lokasi Penelitian.....	66
1. Gambaran Umum Provinsi Jambi.....	66
2. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi.....	71
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	82
1. <i>Content of Policy</i> (Isi Kebijakan).....	82
2. <i>Context of Policy</i> (Konteks Kebijakan).....	92
3. <i>Impact</i> (Dampak Implementasi).....	99
C. Pembahasan Data Fokus Penelitian.....	103
1. <i>Content of Policy</i> (Isi Kebijakan).....	103
2. <i>Context of Policy</i> (Konteks Kebijakan).....	109
3. <i>Impact</i> (Dampak Implementasi).....	114

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	124

DAFTAR PUSTAKA.....

126



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2014.	68
Tabel 4.2 Jumlah Kegiatan Bedah Rumah Tahun 2012	102



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Model Implementasi Kebijakan Grindle 25

Gambar 4.1 Peta Provinsi Jambi 66

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi 77

Gambar 4.3 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Prov. Jambi Berdasarkan Jabatan 78

Gambar 4.4 Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2012 83

Gambar 4.5 Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2012 85

Gambar 4.6 Rumah Sebelum dibedah 86

Gambar 4.7 Rumah Setelah dibedah 86

Gambar 4.8 Rumah Seebelum dibedah 86

Gambar 4.9 Rumah Setelah dibedah 86

Gambar 4.10 Rumah Sebelum dibedah 86

Gambar 4.11 Rumah Setelah dibedah 86

Gambar 4.12 Renstra Dinas PU Provinsi Jambi 90

Gambar 4.13 Laporan data dan alamat rumah tangga sangat miskin 98

Gambar 4.14 Laporan data dan alamat rumah tangga sangat miskin 98



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang belum dapat terselesaikan sampai saat ini, hampir di setiap daerah pasti memiliki masalah kemiskinan.

Pengertian kemiskinan menurut World Bank (1990) dalam (Suryono, 2010: 233)

kemiskinan adalah sebagai ketidak mampuan seorang individu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan

pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya

kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Masalah kemiskinan dapat terjadi karena

beberapa penyebab, penyebab tersebut antara lain bisa terjadi karena, pertama laju pertumbuhan penduduk, kedua angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan yang

pengangguran, ketiga tingkat pendidikan yang rendah, keempat kurangnya perhatian dari pemerintah, kelima distribusi yang tidak merata.

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program anti-kemiskinan semenjak Pembangunan Jangka Panjang Tahap Orde Baru. Tidak hanya strategi pengembangan

ekonomi makro, berbagai program penanggulangan kemiskinan telah pemerintah lakukan, tujuan utamanya yaitu kepada kelompok miskin, mulai dari program Jaring

Pengaman Sosial sampai program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui



berbagai departemen pemerintah. Namun dari pencapaian berbagai program penanggulangan kemiskinan tersebut ternyata belum menunjukkan kemajuan yang berarti dan ini ditunjukkan oleh kenyataannya, secara nasional persentase penduduk miskin tidak berkurang secara berarti.

Sampai saat ini baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah belum bisa menemukan cara untuk mengurangi jumlah kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia. Sehubungan kompleksitasnya permasalahan kemiskinan maka diperlukan penanganan dan komprehensif lintas sektor dan keterpaduan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta *stakeholders* terkait. Menurut Rizalul (2015: 2) Kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh untuk memenuhi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara melalui pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Permasalahan kemiskinan ini juga merupakan salah satu penghambat dalam pembangunan dalam suatu daerah. Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan segala permasalahan dapat ditangani dengan baik, dan juga dapat mempermudah dalam pemerataan pembangunan. Adapun tujuan dari otonomi daerah menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah *menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan*



pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Menurut Hakim (2011: 35) dalam kewenangan otonomi yang dimiliki daerah, melekat pula kewenangan dan sekaligus tanggung jawab untuk secara pro-aktif mengupayakan kebijakan penanggulangan kemiskinan, baik langsung maupun tidak langsung. Dilihat dari sudut pandang tersebut, pelaksanaan otonomi daerah mempunyai potensi positif terhadap kondusivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Provinsi Jambi merupakan bagian dari wilayah Indonesia yang melaksanakan otonomi daerah. Dengan Sumber daya alam yang berlimpah dan posisi geografis yang strategis merupakan salah satu modal utama pembangunan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Akan tetapi, hingga saat ini potensi Sumber Daya Alam yang besar itu belum secara nyata dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Menurut Maryam (2016: 2) untuk mengurangi angka kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin di perdesaan maupun di perkotaan, maka pemerintah Propinsi Jambi meluncurkan program yang dirancang untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) diseluruh Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.

Dengan membangun kecamatan berbasis desa dan kelurahan diharapkan pemerataan pembangunan dapat dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat.



Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup besar. Persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan. Maka dari itulah Pemerintah Daerah memikirkan solusi yang tepat untuk mengurangi jumlah kemiskinan tersebut dan juga dapat mendukung percepatan pembangunan daerah yaitu pemerataan pembangunan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

Berawal dari pemikiran tersebut maka lahirlah program satu milyar satu kecamatan (SAMISAKE). Program SAMISAKE adalah program pemerintah provinsi Jambi yang dilaksanakan dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten/ kota dalam mengurangi angka kemiskinan. Dan ditujukan mengakselerasi percepatan pembangunan di Provinsi Jambi dengan basis kegiatan di Kecamatan dengan alokasi dana sebesar 1 milyar rupiah bertujuan mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah, meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan denyut perekonomian di desa.

Menurut Tjokroamidjojo (1985:180) Salah satu kegiatan penting dalam perencanaan pembangunan adalah perencanaan program-program dan proyek-proyek.

Perencanaan proyek-proyek merupakan batu bata daripada seluruh tembok rencana.

Baik atau buruknya suatu rencana tergantung sekali daripada perencanaan proyek-proyeknya. Program SAMISAKE merupakan sebuah program dari Pemerintahan

pada Era kepemimpinan Gubernur Hasan Basri Agus pada tahun 2012. Program Satu

Milyar Satu Kecamatan (Samisake) tersebut terdapat dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2015 yang dilatar belakangi oleh



5

pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah barat-Tengah dan timur Provinsi Jambi, yang kedua yaitu membantu keterbatasan anggaran yang tersedia di kabupaten/ kota dalam pembangunan. Sesuai yang tertera dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2012, dana transfer untuk Program Samisake dimaksudkan untuk membantu mendukung percepatan pembangunan daerah yaitu pemerataan pembangunan Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi, membantu meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna mengatasi kesenjangan fiscal Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan pembangunan, membantu Kabupaten/ Kota dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota yang tidak tersedia dan atau kurang alokasi dananya.

Sasaran penerima program samisake adalah kepada keluarga yang sangat miskin, sebelumnya Bappeda Provinsi Jambi telah melakukan verifikasi pada tahun 2011 dengan mendata keluarga miskin yang di usulkan oleh Kepala Desa/ Lurah yang disertai dengan foto rumah, foto KK yang bersangkutan, data status tanah, data pelayanan kesehatan, pekerjaan dan data pendidikan anak.

Jika dilihat dari sasaran program tersebut, tujuan Kebijakan pemerintah tersebut salah satu adalah untuk mengurangi kemiskinan yang ada di Provinsi Jambi.

Jenis kegiatan yang terdapat dalam program Samisake ini antara lain : (1) bedah rumah, (2) beasiswa, (3) sertifikat tanah gratis, (4) pengadaan kendaraan roda 3, (5) pengadaan alat mesin pertanian, (6) penguatan UMKM, dan (7) kegiatan prioritas lainnya. Penelitian ini lebih berfokus kepada kegiatan bedah rumah. Pada dasarnya



pembangunan merupakan usaha yang dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan perikehidupan masyarakat dalam setiap aspek dan dimensi kehidupan manusia. Untuk mencapai itu, maka diperlukan serangkaian rencana pembangunan yang dijadikan sebagai landasan untuk menyusun program dan kegiatan pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat lebih terarah.

Permasalahan yang masih dimiliki oleh Provinsi Jambi adalah banyaknya penduduk yang tidak memiliki rumah yang layak huni, hal ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini Gubernur melaksanakan kegiatan bedah rumah Samisake, untuk memperbaiki rumah-rumah penduduk yang tidak layak huni. Hal ini tentu saja untuk penduduk yang benar-benar memenuhi syarat mendapatkan bantuan bedah rumah Samisake.

Usaha pemerintah Provinsi Jambi untuk terus meningkatkan pembangunan di Kota maupun di Kabupaten terus dilakukan dengan harapan tercapainya Visi Jambi Emas 2015 yang tertuang dalam dokumen Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015 tersebut adalah Jambi yang Ekonominya Maju, Adil, Aman dan Sejahtera atau disingkat dengan Jambi EMAS 2015.

Program ini diharapkan mampu mengakomodir semua kebutuhan masyarakat akan pentingnya pemerataan pembangunan baik dari segi individunya maupun fasilitas-fasilitas penunjang kehidupan masyarakat agar seluruh lapisan masyarakat bisa ikut merasakan proses perkembangan pembangunan itu sendiri. Pada pelaksanaannya, banyak sekali program-program percepatan pemerataan



pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan salah satunya adalah program SAMISAKE yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan diperdesaan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat banyak.

Permasalahan utamanya adalah apakah program ini sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (Samisake) Provinsi Jambi

Tahun Anggaran 2012. Dengan ini penulis ingin mengkaji dan melakukan penelitian tentang Peraturan Gubernur tersebut pada kegiatan Bedah Rumah. Terlebih lagi penulis ingin mengetahui sebatas mana keberhasilan dan kegagalan dari program Samisake tersebut, dan juga ingin mengetahui apakah program yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 Pada Kegiatan Bedah Rumah (Studi Kasus di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi)”**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat disusun suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana *Content Of Policy* (Isi Kebijakan) dalam implementasi Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 Pada Kegiatan Bedah Rumah?
2. Bagaimana *Context Of Policy* (Konteks Kebijakan) dalam implementasi Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 Pada Kegiatan Bedah Rumah?
3. Apa *Impact Of Policy* (Dampak Kebijakan) dalam implementasi Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 Pada Kegiatan Bedah Rumah?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis *Content Of Policy* (Isi Kebijakan) Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2012 implementasi Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 Pada Kegiatan Bedah Rumah.
2. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis *Context Of Policy* (Konteks Kebijakan) Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2012 implementasi Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 Pada Kegiatan Bedah Rumah.
3. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis *Impact Of Policy* (Dampak Kebijakan) Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2012 implementasi Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 Pada Kegiatan Bedah Rumah.



D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka dapat dijabarkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dilihat dari segi teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi tambahan dalam member sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi

Publik, terutama yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Gubernur

Nomor 14 tahun 2012 dalam pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah.

2. Dilihat dari segi praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan penting tentang implementasi suatu program dalam penanganan pemerataan pembangunan rumah layak huni pada suatu daerah, dan menjadi laporan

hasil implementasi Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2012 dalam pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah sekaligus acuan untuk daerah-daerah lain untuk menerapkan program yang sama dalam rangka pemerataan pembangunan rumah layak huni.



E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diawali dengan sub bab latar belakang, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kontribusi penelitian baik kontribusi teoritis maupun kontribusi praktis serta pada sub bab terakhir terdapat uraian sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan konsep dan teori yang menjadi acuan atau landasan dalam penelitian ini, diantaranya teori Kebijakan Publik, teori implementasi kebijakan, teori pembangunan dan teori pembangunan lain-lain.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian serta analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian yang diperoleh yang terdiri dari gambaran umum organisasi yang menjadi lokasi penelitian dan data fokus penelitian serta penyajian dan pembahasan terhadap data yang diperoleh.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Banyak penjelasan pengertian kebijakan publik yang dikemukakan menurut para ahli. Menurut Laswell dan Kaplan dalam Nugroho (2011:93) menyatakan bahwa kebijakan sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu (*a projected program of goals, values, and practices*). Selanjutnya Frederich seperti dikutip oleh Abdul Wahab (2008:3) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Definisi lainnya dari David Easton yang dikutip dalam Islamy (2009:19) mengartikan kebijakan public sebagai "*the authoritative allocation of values for the whole society*" (pengalokasian nilai-nilai secara paksa (syah) kepada seluruh anggota masyarakat). David Easton mewujudkan kewenangan pemerintah dalam membuat kebijakan tersebut dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.



Selanjutnya Islamy (2009:20-21) mengemukakan beberapa elemen penting tentang kebijaksanaan negara yaitu:

- a. Bahwa kebijaksanaan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
- b. Bahwa kebijaksanaan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata.
- c. Bahwa kebijaksanaan negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
- d. Bahwa kebijaksanaan negara itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

2. Bentuk-Bentuk Kebijakan Publik

Secara sederhana, seperti yang dijelaskan Nugroho (2011:92), bentuk kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Kebijakan publik yang bersifat *makro* atau umum, atau mendasar, yaitu kelima peraturan meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - 2) Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - 3) Peraturan Pemerintah
 - 4) Peraturan Presiden
 - 5) Peraturan Daerah
- b. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjabar pelaksana. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Wali Kota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Durat Keputusan Bersama antar Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- c. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan publik yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Mentelaah dari pemaparan pengklasifikasian bentuk kebijakan publik yang telah dijabarkan, maka implementasi kebijakan yang digunakan



termasuk dalam bentuk kebijakan publik yang bersifat *meso* atau menengah.

Hal ini dikarenakan implementasi kebijakan tentang Peraturan Gubernur

Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer

Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun

Anggaran 2012.

1. Tahapan-tahapan Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan.

Menurut Dunn (2003:24) tahapan-tahapan yang ada dalam bentuk kebijakan publik tersebut adalah:

- a. Tahap penyusunan agenda
- b. Tahap formulasi kebijakan
- c. Tahap adopsi kebijakan
- d. Tahap implementasi kebijakan
- e. Tahap evaluasi kebijakan



B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Definisi Implementasi Kebijakan Publik

Kamus Webster dalam Abdul Wahab (2008:64) pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana “*to implement*” (mengimplementasikan) berarti “*to provide means for carrying out; to give practical effect to*” (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan, menimbulkan dampak/ berakibat sesuatu). Dalam studi kebijakan public, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut-paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa dan apa yang di dapat dari suatu kebijakan.

Van Metter dan Horn dalam Abdul Wahab (2008:66) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “*Those action by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement or objectives set forth in prior policy decisions*”. Definisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, individu atau kelompok pemerintah atau swasta yang mengarah pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam ditetapkan.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses implementasi kebijakan yang dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kekuatan politik, ketaatan kelompok sasaran, kondisi ekonomi dan sosial dalam proses pencapaian tujuan yang telah



ditetapkan dan dilakuka oleh pemerintahan ataupun swasta sehingga memiliki hasil yang dicapai.

2. Model Implementasi Kebijakan Publik

Pada dasarnya terdapat beberapa model implementasi kebijakan public seperti yang dikutip oleh Nugroho (2014:665-678), diantaranya:

a. Model Merile S. Grindle

Model **Merile S. Grindle**. Model ini berkembang pada tahun 1980. Berdasarkan model yang dibuat oleh tokoh di atas maka Wibawa (1994:22) dalam Nugroho (2014:550) menyatakan bahwasanya model ini ditentukan oleh isi kebijakan dalam konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah, bahwa setelah kebijakan ditransforamasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan, dan keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari suatu kebijakan. Adapun isi dari kebijakan tersebut mencakup:

- 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan.
- 4) Kedudukan embuat kebijakan.
- 5) Siapa pelaksana program.
- 6) Sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu, konteks implementasinya adalah: (1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; (2) Karakteristik lembaga dan penguasa; (3) Kepatuhan dan daya tangap. Berdasarkan uraian diatas dapat



dicermati bahwasanya model ini merupakan model yang memberikan pemahaman secara komprehensif terhadap konteks kebijakan. Selain itu model ini juga bersifat *top down and market mechanism*. (Nugroho, 2014:510-511).

b. Model Van Meter dan Van Horn

Model ini dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn pada tahun 1975. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah sebagai berikut :

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
2. Karakteristik agen peleksana
3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik
4. Kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementor. (Nugroho, 2014:665-666)

c. Model Mazmanian dan Sabatier

Model ini dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier pada tahun 1983. Model ini disebut sebagai Kerangka Analisis Implementasi (*A Framework for Implementation Analysis*). Duet Mazmanian Sabatier mengklasifikasikan proses kebijakan ke dalam tiga variabel. *Pertama*, variabel independen, yaitu mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman



objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. *Kedua*, variabel *intervening*, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketetapan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indicator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana. *Ketiga*, variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan-pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut. Dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar. Nugroho, (2014:666-667).

d. Model George C.Edward III

Menurut George C.Edward III dalam Winarno (2012:177-211) implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan public, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan masyarakat yang dipengaruhinya. Lebih lanjut lagi dalam mengkaji implementasi kebijakan, ada empat faktor yang mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Adapun empat faktor yang dimaksud Edward yaitu:



1) Komunikasi

Berkenan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.

Terdapat tiga indikator yang dipakai sebagai ukuran dari keberhasilan variable komunikasi, yaitu:

- a) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula. Seringkali hal yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah salah pengetian. Hal ini dikarenakan komunikasi melalui tingkatan birokrasi.
- b) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaku kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan.
- c) Konsistensi, perintah yang diberikan haruslah konsisten dan juga jelas, sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

2) Sumber daya

Berkenan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia, sarana prasarana dan sumber daya keuangan. Hal ini berkenan dengan kecakapan pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara efektif. Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan serta bagaimanapun



akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan tersebut, jika para pelaksana kebijakan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Disisi lain fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staff yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan tanpa pembekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.

3) Disposisi

Berkenan dengan ketersediaan dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan public tersebut. Sikap yang baik atau positif para pelaksana terhadap suatu kebijakan menandakan suatu dukungan yang mendorong mereka menunaikan kewajiban sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan. Banyak kebijakan masuk ke dalam "Zona ketidakacuhan". Ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari pelaksana. Jika seseorang diminta untuk melaksanakan perintah-perintah yang mereka tidak



setujui, maka kesalahan-kesalahan dapat terjadi, yakni antara keputusan-keputusan kebijakan dan pencapaian kebijakan. Dalam kasus seperti ini, maka pelaksana kebijakan akan menggunakan keleluasaan dan terkadang dengan cara yang halus untuk menghambat implementasi.

4) Struktur Birokrasi

Berkenan dengan kesesuaian birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak menjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik, yakni pertama, *Standard Operating Procedures* (SOP), yakni suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pelaksana kebijakan/administrator/birokrasi melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan warga. Kedua, *fragmentasi* adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

e. Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun

Menurut kedua pakar ini, seperti yang dijelaskan Nugroho (2014:170-174) untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat, yaitu:



- 1) Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar.
- 2) Apakah untuk melaksanakannya tersedia sumberdaya yang memadai, termasuk sumberdaya waktu.
- 3) Apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada.
- 4) Apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal.
- 5) Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi.
- 6) Apakah hubungan saling ketergantungan kecil.
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- 8) Bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar.

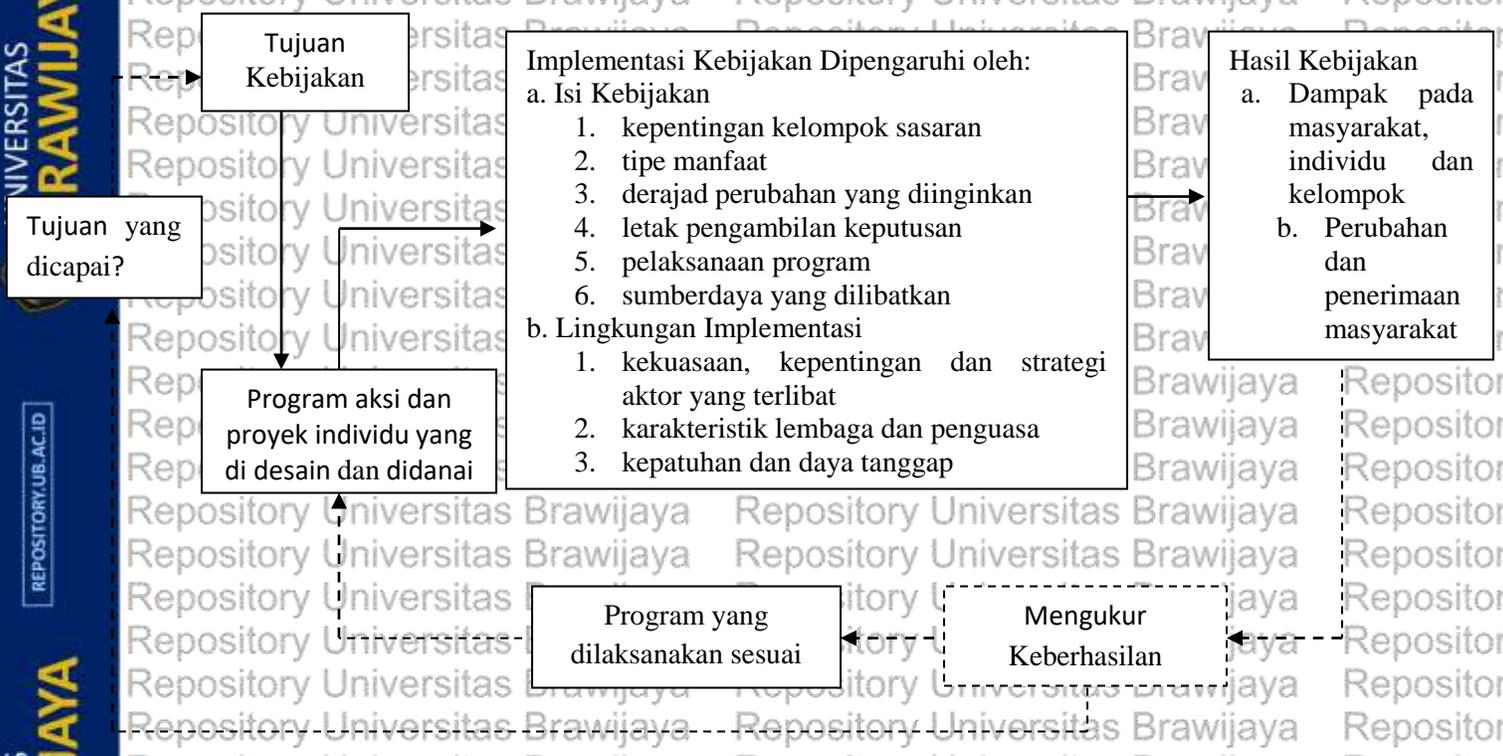


3) Model Analisis Implementasi Kebijakan Grindle

Model implementasi kebijakan yang digunakan sebagai pisau analisis oleh peneliti adalah model yang diajarkan oleh Merilee S Grindle yang dikenal dengan nama *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih.

Menurut Grindle dalam Agustino (2008: 154), pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat pada dua hal yaitu:

- a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- b. Apakah tujuan kebijakan tercapai dengan melihat dua faktor yaitu:
 - *Impact* atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.



Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Grindle

Sumber : Subarsono (2015: 11)



Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle (Agustino, 2008: 154) juga amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas Isi Kebijakan (*Content of Policy*), Konteks Kebijakan (*Context of Policy*) dan *Impact*. Menurut Grindle kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang saling berbeda lebih sulit diimplementasikan sehingga konten kebijakan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan suatu kebijakan, dan konteks kebijakan mempengaruhi implementasinya. *Content of Policy* sendiri terdiri atas beberapa elemen antara lain:

a. Kepentingan kelompok sasaran

Suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut berpengaruh terhadap implementasinya. Kata “kepentingan” merujuk pada pihak-pihak yang terkena dampak implementasi kebijakan publik baik langsung maupun tidak langsung, baik menguntungkan ataupun tidak.

b. Tipe Manfaat

Suatu kebijakan harus menghasilkan beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan. Manfaat yang dihasilkan berkaitan dengan bagaimana dan sejauhmana implementasi kebijakan publik membawa perubahan perilaku pihak-pihak yang bersangkutan. Disini berlaku rumusan bahwa semakin pihak merasa implementasi kebijakan menguntungkan dirinya, semakin pihak



itu memberikan dukungannya (kooperatif). Selain itu, program yang memberikan manfaat secara kolektif akan mendapatkan dukungan dalam implementasinya dan sebaliknya. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa suatu kebijakan harus *win-win solution*.

c. Derajat perubahan yang diinginkan

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai dalam artian seberapa besar perubahan yang hendak dicapai melalui suatu implementasi harus mempunyai skala yang jelas. Selain itu, semakin sedikit perubahan perilaku masyarakat yang diharapkan maka kebijakan tersebut akan lebih mudah diimplementasikan, tetapi untuk program yang mengharapkan adanya perubahan yang mendasar di masyarakat apalagi dalam jangka panjang akan sulit untuk diimplementasikan.

d. Letak pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan berkaitan dengan siapa yang memegang/ memiliki kewenangan dalam menerapkan kebijakan publik. Pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang diimplementasikan sehubungan dengan tingkat dampak kebijakan tersebut, apakah berdampak pada skala nasional, provinsi, atau lokal. Kemudian, dari sisi stakeholder, *site of decision making* dapat dilihat sejauhmana stakeholder bersangkutan diberi wewenang untuk mengubah kebijakan, baik secara substantif maupun teknis.



e. Pelaksanaan program

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Pelaksana kebijakan juga berkaitan dengan berapa banyak instansi yang ikut dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Besarnya jumlah instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan memiliki keuntungan bahwa wilayah yang luas akan tertangani lebih baik. Namun demikian, jumlah instansi terlibat yang besar tidak selalu menguntungkan, bahkan dapat terjadi tumpang tindih kewajiban. Efisiensi keterlibatan instansi harus dianalisis secara seksama dalam proses implementasi kebijakan.

f. Sumberdaya yang dilibatkan

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Sumberdaya meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Non-Manusia. Kondisi sumber daya yang dimiliki oleh instansi pelaksana kebijakan pasti berbeda-beda, dan ini akan menyebabkan perbedaan pula pada tingkat keberhasilan implementasi.



Context of Policy terdiri oleh beberapa pokok antara lain:

a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat

Dalam kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan, kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan implementasi kebijakan. Aktor-aktor tersebut bisa mencakup partisipan tingkat pusat, provinsi, atau lokal baik itu kalangan birokrat, pengusaha, maupun masyarakat umum.

Keseluruhan aktor tersebut mungkin secara intensif maupun masyarakat umum. Keseluruhan aktor tersebut mungkin secara intensif ataupun tidak, dapat mempengaruhi implementasi kebijakan (tergantung konten dan program dan strukturnya dimana kebijakan tersebut dilaksanakan). Mereka terlibat dalam implementasi program, dan masing-masing aktor memiliki kepentingan tertentu terhadap program tersebut dan mereka berusaha mencapainya dengan membuat ketentuan-ketentuan dalam prosedur alokasinya.

b. Karakteristik lembaga dan penguasa

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu karakteristik dari suatu lembaga juga turut mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Kapabilitas kekuasaan dari para aktor dan karakteristik dari penguasa juga turut dipertimbangkan dalam menganalisis implementasi kebijakan.



c. Kepatuhan dan daya tanggap

Pada poin ini berbicara mengenai sejauh mana kepatuhan dan respon pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Untuk menciptakan kepatuhan stakeholder, birokrat harus berhadapan dengan masalah yang berkaitan dengan bagaimana menjaga ketaatan agar hasil kebijakan dapat dicapai, walaupun mereka harus menangani berbagai interaksi di antara stakeholder dalam implementasi kebijakan tersebut. Kemudian, bagaimana responsivitas birokrat terhadap keinginan-keinginan dari mereka yang akan menerima manfaat dari kebijakan agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

Sedangkan *Impact*:

Bagaimana suatu kebijakan dapat berdampak positif pada masyarakat, kelompok dan individu. Secara sederhana dapat dikatakan dampak adalah hasil dalam jangka panjang dan lebih luas efeknya. Hampir sama seperti hasil, setiap kegiatan atau perbuatan selalu menimbulkan dampak, bisa dampak yang baik, bisa pula dampak yang buruk.

4) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2008: 71), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana.
2. Tersedia waktu dan sumber daya.
3. Keteraduan sumber daya.



4. Implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal.
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung.
6. Hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan.
7. Kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis.
9. Komunikasi dan koordinasi yang baik.
10. Pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

Menurut Grindle dalam (Wibawa, dkk., 1994: 15) implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan berkaitan dengan kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Sedangkan George C Edward III dalam (Subarsono, 2015:90) memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi (sikap), (4) struktur birokrasi.

C. Teori Pembangunan

Perkembangan ilmu perencanaan pembangunan sebagai ilmu yang multidisipliner, dimulai pada tahun 1965 ke atas terjadi perakihan tulisan maupun pembahasan dari perencanaan ekonomi melainkan perencanaan pembangunan dengan



diterbitkannya buku berjudul *Development Planning* yang ditulis oleh Arthur Lewis.

Pergeseran paradigma ini bertujuan bahwasanya perencanaan tidak hanya sebatas perencanaan ekonomi saja melainkan dalam berbagai aspek seperti sosial, politik maupun budaya.

Pembangunan memiliki pengertian yaitu suatu proses perubahan yang terencana, dimana perubahan tersebut mencakup sistem sosial seperti ekonomi, politik, pendidikan, infrastruktur, dll. Pengertian pembangunan menurut Bryant dan White dalam (Suryono, 2010:2) yaitu “Pembangunan upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya dengan memiliki lima implikasi utama yaitu: (1) pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu maupun kelompok (*capacity*), (2) pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*), (3) pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya (*empowerment*), (4) pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*). (5) pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara satu kepada negara lain, menciptakan hubungan saling menguntungkan dan menghormati (*interdependence*).

Dengan demikian adanya pembangunan di suatu daerah diharapkan dapat mendorong suatu perubahan ke arah yang lebih baik (modern) dengan tetap mempertahankan masyarakat sebagai pilar perubahan bukannya menjadikan masyarakat sebagai objek dari perubahan tersebut. Dengan adanya partisipasi



masyarakat dalam suatu pembangunan akan memberikan dampak langsung kepada masyarakat mengenai kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pembangunan sendiri memiliki unsure-unsur kandungan seperti yang di jelaskan oleh Suryono (2010:4) yaitu :

- a. Perubahan, yaitu perubahan dari suatu yang dianggap masih kurang menuju kesempurnaan;
- b. Tujuan, yaitu tujuan yang diarahkan dari, oleh, dan untuk rakyat (manusia) menuju pelestarian, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup yang lebih baik; dan;
- c. Potensi, yaitu potensi masyarakat yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri yang kemudian dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Hal yang sama di jelaskan kembali oleh Tjokrowinoto (dalam Suryono, 2010) yang menyimpulkan beberapa makna pembangunan sebagai citra pembangunan dalam perspektif diakronis (pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu yang dasarnya tidak jelas) sebagai berikut:

- a. Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ketataran kehidupan masyarakat yang lebih baik;
- b. Pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana, dan melembaga;
- c. Pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai (*value free*);
- d. Pembangunan memperoleh sifat dan konsep *transcendental*, sebagai *metadisciplinary phenomenon*, bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi, *the ideology of developmentalism*;



- e. Pembangunan sebagai konsep syarat nilai (*value loaded*) menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara makin meningkat;
- f. Pembangunan menjadi *culture specific, situation specific* dan *time specific*.

Dengan ciri-ciri atau karakteristik pada umumnya pembangunan dilakukan secara terencana, maka menurut Tjokrowinoto (dalam Suryono, 2010) menyebutkan adanya Sembilan tipe pembangunan yakni:

- a. Tipe ideal (*ideal type*) dengan cirri perencanaan yang mampu mengendalikan pertumbuhan dan perubahan sistem;
- b. Tipe menghasilkan dalam jangka pendek (*short run pay of*) dengan cirri perencanaan yang mengendalikan pertumbuhan, tetapi tidak dalam perubahan sistem;
- c. Tipe menghasilkan dalam jangka panjang (*long run pay of*) dengan cirri perencanaan yang mampu mengendalikan sistem, tetapi tidak dalam pertumbuhan;
- d. Tipe kegagalan (*failure*) dengan cirri adanya perencanaan, tetapi tidak mampu mengendalikan baik pertumbuhan maupun perubahan sistem;
- e. Tipe dorongan lingkungan (*environmental stimulus*) dengan cirri lebih menguntungkan perubahan sistem dan mengabaikan pentingnya perencanaan dan pertumbuhan;
- f. Tipe pragmatis (*pragmatisme*) dengan cirri lebih mengutamakan adanya pertumbuhan dan perubahan sistem, tetapi mengabaikan pentingnya perencanaan;



- g. Tipe krisis (*crisis*), dengan ciri lebih mengutamakan tingkat pertumbuhan dan mengabaikan pentingnya perencanaan dan perubahan sistem;
- h. Tipe masyarakat statis (*static society*) dengan ciri mengabaikan pentingnya semua aspek perencanaan, pertumbuhan, maupun perubahan sistem;
- i. Tipe chaos ditandai dengan fenomena masyarakat yang *confusion/* kebingungan, *hassle/* percekocan, *angry/* kemarahan, *obstacle/* banyak halangan, dan *stagnant/* mandeg, jalan ditempat.

Dengan adanya tipe-tipe pembangunan inilah terdorongnya perubahan yang ada di masyarakat. Pembangunan di harapkan dapat sebagai upaya peningkatan kemampuan untuk merencanakan masa depan dengan sumber daya yang telah tersedia, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

1) Paradigma Pembangunan

Paradigma pembangunan dari waktu ke waktu terus berubah sesuai dengan tuntutan jaman dan permasalahan yang ada. Terjadinya suatu permasalahan yang besar menuntut pergeseran paradigma yang lama dan terbentuklah paradigma yang baru. Adapun pergeseran paradigma menurut Suryono (2010) sebagai berikut:

a. *Growth Paradigm* (Paradigma Pertumbuhan)

Dimulai pada sekitar dasa warsa 1960-an, banyak negara-negara dunia ketiga (termasuk Indonesia) meniru atau mengadopsi pendekatan "*growth priority*" yang menfokuskan diri pada akumulasi kapital nasional, dengan GNP sebagai ukuran keberhasilannya. Dengan ditingkatkan pendapatan perkapita diharakan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan



yang dihadapi negara dunia ketiga dapat terpecahkan, misalnya melalui apa yang dikenal dengan dampak merembas ke bawah (*trickle down effect*). Fenomena ini terlihat dari pemikiran-pemikiran awal mengenai pembangunan, seperti teori Adam Smith, Harrod Domar, Nurkse, Leibenstein. Konsep dan strategi pembangunan semacam itu dijiwai oleh pengalaman negara-negara Eropa: Eurocentrism, Eropa sentries, dalam pemikiran awal tentang pembangunan. Melalui pendekatan ini, memang pada akhirnya banyak negara berkembang telah terbukti berhasil meningkatkan akumulasi kapital dan pendapatan perkapitanya. Namun keberhasilan paradigma pertumbuhan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, telah membawa berbagai akibat yang negatif. Momentum pembangunan dicapai dengan pengorbanan (*at the expense of*): deteriorisasi ekologis penyusutan sumber alam, timbulnya kesenjangan sosial, dan dipendensi. Kritik-kritik tajam ditunjukkan pada paradigma ini, misalnya sejumlah pemikiran di *Massachusetts Institute of Technology and Club of Rome* (1975), memperingatkan bahwa dalam laju pembangunan dunia dan pertumbuhan penduduk tetap seperti ini, pada suatu ketika akan terjadi kehancuran planet-planet bumi ini sebagai suatu sistem. Menurut beberapa pengkritik yang lain, mengungkapkan bahwa selama kurun waktu 1975-2000 pembangunan ekonomi bukan saja menyebabkan kenaikan dalam ketimpangan relatif, akan tetapi lebih parah lagi, membawa pula kemerosotan dalam tingkat hidup absolute dari golongan yang miskin atau berpendapatan rendah. Dorongan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang setingginya seringkali mengakibatkan terabaikannya upaya pembinaan kelembagaan dan pembinaan kapasitas.



b. *Growth With Distribution Paradigm* (Paradigma Pertumbuhan dengan Pemerataan)

Menyadari kegagalan strategi pertumbuhan diatas, maka pendekatan pembangunan di negara-negara berkembang kemudian bergeser pada *growth with distribution* dengan strategi utama “*employment-oriented development*”. *Growth With Distribution Paradigm* digunakan untuk menggambarkan empat pendekatan dasar

yang apabila digunakan tersendiri atau dala kombinasi dapat diharapkan akan bisa meningkatkan pendapatan golongan paling miskin. Keempat pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan golongan masyarakat miskin itu adalah: (1)

Meningkatkan laju pertumbuhan GNP sampai tingkat maksimal dengan jalan meningkatkan tabungan dan mengalokasikan sumber sumber daya secara lebih efisien, yang manfaatnya dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat. (2)

Mengalihkan investasi ke golongan golongan miskin dalam bentuk pendidikan, menyediakan kredit, fasilitas-fasilitas umum dan sebagainya. (3) Mendistribusikan pendapatan atau konsumsi kepada golongan miskin melalui sistem fiscal atau melalui alokasi barang-barang konsumsi secara langsung. (4) Pengalihan harta yang sudah

ada kepada golongan-golongan miskin misalnya melaui *land reform*. Fokus dari strategi ini mengarah pada penyediaan atau penciptaan lapangan pekerjaan langsung bagi masyarakat, sebagai alat untuk mendistribusikan pertumbuhan dan kesejahteraan yang dihasilkan oleh mesin ekonomi nasional. Kelompok sasaran dari pendekatan ini seperti diinginkan oleh Bank Dunia (World Bank) adalah 40% penduduk negara yang tergolong miskin. Keberhasilan strategi ini sangat tergantung pada konteks politik



negara berkembang yang bersangkutan. Artinya apakah golongan yang berkuasa beranggapan bahwa peningkatan tingkat hidup golongan miskin memang baik bagi kepentingan diri golongan yang berkuasa, sehingga mereka berketetapan hati untuk mendukung dan melaksanakan secara efektif strategi tersebut. Namun, pendekatan ini pada akhirnya memang juga terbukti gagal, karena “*World Employment Program*” yang dikenakan oleh ILO lebih bersifat “*comprehensive employment strategies*” dengan konsekuensi teknologi yang menyertainya adalah teknologi tinggi yang bersifat “*capital intensive*” sehingga hanya orang-orang yang berpendidikan dan berketrampilan yang dapat diserap oleh lapangan pekerjaan yang diciptakan. Sementara itu, mereka yang tidak berpendidikan dan berketrampilan yang jumlahnya 60% dari seluruh angkatan kerja, tetap berada diluar jangkauan distribusi kesejahteraan nasional.

c. *Appropriate Technology Paradigm* (Paradigma Teknologi Tepat Guna):

Kegagalan dari teknologi yang “*capital intensive*” dalam penyediaan lapangan kerja dan sebagian besar penduduk dunia ketiga, telah memicu lahirnya pendekatan baru yang disebut “*appropriate technology*” atau teknologi tepat guna. Filosofi dari pendekatan ini menyatakan bahwa perluasan kesempatan kerja tidak harus dilakukan melalui pengembangan pola-pola kebutuhan masyarakat, melainkan juga dapat dilakukan melalui penciptaan barang-barang produksi melalui cara-cara yang lebih bersifat padat karya. Pendekatan ini diyakini lebih sesuai untuk negara-negara berkembang karena melalui teknologi ini maka sumber-sumber daya lokal yang tersedia dapat bermanfaat sebagai sumber penghasilan penduduk. Pendekatan ini



juga diyakini lebih bersifat “*labor intensive*” lebih banyak orang dapat terlihat karena sifatnya yang “*less skill intensive*” dan “*smaller scale*”. Pendekatan ini sering juga disebut sebagai “*intermediate technology*” yang intinya merupakan sintesa dari “*capital intensive technology*” dan “*handicraft technology*”. Pendekatan ini juga akhirnya dianggap tidak dapat memuaskan usaha-usaha penciptaan pemerataan pendapatan dan pertumbuhan nasional dalam rangka mengurangi jurang kesenjangan ekonomi, sosial dan special. Hal ini disebabkan antara lain, keterbatasan pengembangan teknologi tepat guna di negara-negara sedang berkembang yaitu: (a) tidak ada institusi yang secara khusus bertugas untuk mengembangkan teknologi tepat guna. (b) selisih harga yang cukup dasar antara teknologi impor dengan menciptakan teknologi baru (teknologi impor lebih murah), dan (c) sistem nilai yang tidak mendukung. Peneliti dan praktis lebih suka bekerja dengan teknologi tinggi (Hitech) daripada menggunakan teknologi madya, walaupun teknologi sederhana sudah diketahui secara luas akan dapat menampung tenaga kerja lebih banyak dan ramah lingkungan.

d. *Basic Needs Development Paradigm* (Paradigma Kebutuhan Dasar Pembangunan):

Orang pertama yang menganjurkan kebutuhan dasar adalah Mahbub ul Haq (1973) dari Bank Dunia. Haq menyebutkan pendekatan ini merupakan serangan langsung terhadap kemiskinan. Paradigma ini lahir karena adanya kekecewaan yang makin besar terhadap pertumbuhan Produk Nasional Bruto (GNP) yang semakin rendah dan atas pengurangan kemiskinan di banyak negara-negara berkembang.



Menyusul beragam ketidakpuasan tadi, pada tahun 1976 ILO menirbitkan suatu dokumen yang bertitle "*Employment, Growth and Basic Needs*", yang menjadikan *basic needs* sebagai tema sentral atau tema unggulan untuk pembangunan dunia ketiga. Konsep dasar dari pendekatan ini adalah penyediaan kebutuhan minimum bagi penduduk yang tergolong miskin. Kebutuhan minimum yang dimaksud tidak hanya terbatas pada hanya pangan, pakaian dan papan saja, melainkan juga kemudahan akses pada pelayanan air bersih, sanitasi, transport, kesehatan dan pendidikan. Selama penduduk miskin sebagian besar terdapat di daerah pedesaan, maka pendekatan basic needs ini kemudian menjadi tekanan dan unggulan dari pembangunan pedesaan.

Dengan demikian pendekatan yang dikonsepskan bukannya pendekatan "*central planning*" melainkan lebih bersifat "*community development*". Pada pertengahan 1970-an, pendekatan ini sangat populer dan telah mengesankan citra lain dari pembangunan yang dilakukan pada tahun 1960-an yang lebih digerakkan oleh mitos-mitos pertumbuhan. Namun demikian, bersamaan dengan itu, terjadi kemunduran ekonomi dari negara-negara OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) yang disebabkan oleh "*the first oil shock*", yang kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai "*the new international economic order*". Seiring dengan hal ini, pada tahun 1976 Bank Dunia merasa perlu untuk mendefinisikan situasi ekonomi internasional ke dalam kebijaksanaan baru yang disebutnya sebagai "*recapture the momentum of economic growth*". Setahun kemudian, konsep Bank Dunia mengenai problem utara-selatan ini menjadi pendekatan baru yang pelaksanaannya diserahkan kepada Willy Brandt tersebut adalah ditelantarkannya pendekatan "*basic needs*"



strategy” oleh mereka yang sebelumnya terlibat di dalamnya. Pada akhir 1970-an, “*basic needs strategy*” telah dianggap “kenangan masa lampau” dengan catatan-catatan besar yang menekankan pentingnya pembangunan di pedesaan, namun tak ada satupun yang dapat dihasilkan.

e. *Sustainable Development Paradigm* (Paradigma Pembangunan Berkelanjutan).

Ide dasar dari konsep “*sustainable development*” bermula dari The Club of Rome pada tahun 1972, yakni sekelompok orang yang terdiri dari pada manajer para ahli ilmu teknik, dan ilmuwan se-Eropa, yang berhasil menyusun suatu dokumen penting mengenai keprihatinan terhadap lingkungan yang disebutnya sebagai “*The Limits to Growth*”. Pesan penting dari dokumen tersebut diantaranya adalah : bahwa sumber daya alam telah berada pada suatu tingkat ketersediaan yang memprihatinkan dalam menunjang keberlanjutan (*sustainability*) pertumbuhan penduduk ekonomi. Kehancuran yang serius pada hutan-hutan di Eropa Barat, terjadinya “*oil shock 1983*”, kelaparan di benua Afrika, menurunnya kualitas lingkungan di negara-negara tropis, semakin menipisnya lapisan ozon, efek rumah kaca yang menyebabkan “*global warming*”, telah semakin menunjukkan betapa seriusnya masalah lingkungan hidup. Apabila perubahan tidak segera dilakukan, maka dunia akan segera menemukan kehancurannya. Maka perubahan harus dimulai dari negara-negara yang dianggap bersalah dalam menyumbangkan kerusakan bumi. Mereka adalah negara-negara industri yang telah mengkonsumsi sumber daya energi alam secara berlebihan untu kepentingan komersial. Amerika, Kanada dan Jepang menduduki peringkat atas



sebagai negara-negara yang mengkonsumsi energi bumi paling banyak. Kesadaran akan kritis lingkungan hidup di bumi kemudian telah melahirkan kesadaran akan konsekuensi transnasional dari pembangunan yang berlebihan (*over development*).

Maka perhatian kepada kelestarian hutan-hutan tropis di negara miskin mulai menjadi mulai menjadi agenda penting dunia. Di sinilah konsep “*sustainable*” menemukan kelahirannya. *Sustainability*, diartikan sebagai : “suatu pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merugikan kebutuhan generasi masa datang”. Resiko dan konsekuensi dari setiap pembangunan saat ini hendaknya jangan semuanya diwariskan kepada generasi mendatang. Melainkan harus dipertimbangkan secara adil bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.

f. *Empowerment Paradigm* (Paradigma Pemberdayaan):

Konsep *empowerment* (pemberdayaan), yang dibidani oleh Friedmann. Muncul karena adanya dua premis mayor, yakni kegagalan dan harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena adanya alternatif-alternatif pembagunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai.



D. Teori Pembangunan Lain-Lain

1. Pemberdayaan

a) Pengertian Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan atau *empowerment* merupakan paradigma baru dalam pembangunan masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Menurut merriam webster dan oxford english dictionary (dalam priyono dan pranarka, 1996 : 3) mengandung dua pengertian yaitu : pengertian pertama adalah *to give power or authority to*, dan pengertian kedua berarti *to give ability to or enable*.

dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. sedang dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.

World Bank (dalam Mardikanto dan Soebito, 2012:27) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara atau menyuarakan pendapat, ide, gagasan-gagasan, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih sesuatu konsep, metode, produk dan tindakan yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya.

Dalam pengertian tersebut, menurut Mardikanto dan Soebiato (2012:28) pemberdayaan mengandung arti memperbaiki mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik antara lain dalam arti:



- a. Perbaiki ekonomi, terutama kecukupan pangan.
- b. Perbaiki kesejahteraan sosial berupa pendidikan dan kesehatan.
- c. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan.
- d. Terjaminnya keamanan.
- e. Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk:

- a. Memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan.
- b. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.

Levin (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2012:27).

Dari pengertian-pengertian yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu kelompok untuk mampu melakukan sesuatu sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat



b) Tujuan Pembedayaan

Tujuan dasar pemberdayaan menurut Payne (dalam Ardaani, 2012:24), adalah “keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah-langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar.” Tujuan pemberdayaan secara umum adalah membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi atau daya yang dimiliki serta adanya untuk mengembangkan kearah yang lebih baik dari sebelumnya.

Sedangkan Tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Hadisapoetro (2008:111) meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut :

- a. Perbaikan pendidikan dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik.
- b. Perbaikan aksesibilitas dalam sumber pembiayaan, penyediaan produk dan peralatan serta lembaga pemasaran.
- c. Perbaikan tindakan diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin baik.
- d. Perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jaringan mitra usaha.
- e. Perbaikan usaha diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.



f. Perbaikan pendapatan diharapkan akan memperbaiki pendapatan yang diperolehnya termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

g. Perbaikan lingkungan diharapkan memperbaiki lingkungan karena kerusakan lingkungan sering kali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

h. Perbaikan kehidupan diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

i. Perbaikan masyarakat diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

c) Tahap-Tahap Pemberdayaan

Proses pemberdayaan masyarakat menurut Priyono (dalam Kumalasari 2014:23), dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

a. Tahap inisiasi, dimana masyarakat mendapatkan keberdayaan diri dari pihak luar, dilakukan oleh pihak luar dan diperuntukkan bagi masyarakat. Dalam tahap ini, masyarakat masih bersifat pasif, tergantung dari apa yang diberikan oleh pihak luar.

b. Tahap partisipatoris, dimana masyarakat mendapatkan keberdayaan dari pihak luar, dilakukan bersama masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat. Dalam tahap ini masyarakat baru berpartisipasi terhadap kegiatan yang disusun dan direncanakan pihak luar.

c. Tahap emansipatoris, dimana masyarakat mendapatkan keberdayaan diri, oleh, dan menentukan kegiatan secara self-help untuk mereka



sendiri. Pada tahap ini masyarakat aktif memikirkan, merencanakan dan menentukan kegiatan secara self-help untuk mencapai harapan yang mereka inginkan.

Sedangkan tahapan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat menurut Deliveri (dalam Supriyanto dan Subejo 2004:8) dimulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat. Secara rinci masing-masing tahap tersebut adalah sebagai berikut:

Tahap 1. Seleksi lokasi

Tahap 2. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat

Tahap 3. Proses pemberdayaan masyarakat:

- Kajian keadaan pedesaan partisipatif
- Pengembangan kelompok
- Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan
- Monitoring dan evaluasi partisipatif

Tahap 4. Pemandirian Masyarakat

2. Kesejahteraan Masyarakat

Dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Kesejahteraan



masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.

(Badrudin, 2012)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dimana dalam penyelenggaraannya dilakukan atas dasar kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas dan keberlanjutan.

3. Teori Ketergantungan

Teori Ketergantungan atau dikenal teori depedensi ([bahasa inggris: Dependency Theory](#)) adalah salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut [Negara Dunia Ketiga](#). Menurut [Theotonio Dos Santos](#), Dependensi (ketergantungan) adalah keadaan di mana kehidupan [ekonomi](#) negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, di mana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Aspek penting dalam kajian



[sosiologi](#) adalah adanya pola ketergantungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya dalam kehidupan berbangsa di dunia. Teori Dependensi lebih menitik beratkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara pinggiran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa teori dependensi mewakili "suara negara-negara pinggiran" untuk menantang hegemoni [ekonomi](#), [politik](#), [budaya](#) dan [intelektual](#) dari [negara maju](#).

Menurut Dos Santos (dalam Suryono 2010:143) membagi masalah ketergantungan menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Ketergantungan kepada kolonial

Ketergantungan kolonial ditandai oleh bentuk hubungan perdagangan ekspor pada jaman penjajahan dimana kekuatan-kekuatan komersil yang beraliansi dengan pemerintahan kolonial mendominasi hubungan ekonomi diantara negeri-negeri penjajah dengan negeri-negeri jajahan melalui sistem perdagangan monopoli yang dilengkapi dengan sistem perdagangan monopoli penguasaan tanah, pertambangan dan tenaga kerja oleh pemerintahan kolonial di negeri-negeri jajahan.

2) Ketergantungan kepada industri dan keuangan

Ketergantungan industri dan keuangan ditandai dengan adanya suatu dominasi modal besar dinegara-negara penjajah yang mana ekspansinya kenegeri-negerijajahan dilakukan dengan investasi dalam produksi bahan-bahan mentah primer untuk tujuan konsumsi di negeri-negeri penjajah ini.

3) Ketergantungan kepada teknologi industri



Ketergantungan kepada teknologi industri berkembang setelah Perang Dunia II yaitu sebagai akibat operasi perusahaan-perusahaan asing yang melakukan investasinya disektor-sektor industri untuk memenuhi pasaran didalam negeri-negeri terbelakang.

E. Program SAMISAKE

Program SAMISAKE pada dasarnya merupakan sebuah program yang ditujukan mengakselerasi percepatan pembangunan di Provinsi Jambi dengan basis kegiatan di kecamatan dengan alokasi dana sebesar 1 milyar rupiah bertujuan mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah, meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan denyut perekonomian di desa. Program SAMISAKE ini diarahkan dalam upaya untuk : (1) akselerasi pemerataan pembangunan, (2) menciptakan keadilan ekonomi, (3) akselerasi percepatan daya saing daerah, dan (4) meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Program SAMISAKE tersebut dilaksanakan sebagai bentuk perwujudan pembangunan yang berorientasi pada *pro-poor*, *pro-job*, *pro-growth* dan *pro-environment* yang sejalan dengan strategi Pembangunan Nasional.

Sasaran penerima program samisake dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 2, sebagai berikut:

- a. Kepala Keluarga (KK) sangat miskin beserta anggota keluarganya sesuai dengan *data base* hasil verifikasi Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2011;



- b. KK sangat miskin di luar *data base* hasil verifikasi Bappeda Provinsi Jambi tahun 2011, dengan ketentuan apabila semua KK sangat miskin hasil verifikasi Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2011 telah terakomodir seluruhnya;
- c. Sasaran penerima seperti yang dimaksud pada huruf b diusulkan oleh Kepala Desa/ Lurah diketahui Camat dan disertai data pendukung antara lain : foto rumah, foto KK yang bersangkutan, data status tanah, data pelayanan kesehatan, pekerjaan dan data pendidikan anak;
- d. Bantuan program Samisake diberikan kepada Kepala Keluarga sangat miskin beserta keluarganya secara berkelompok sesuai dengan petunjuk teknis.
- e. Penerima bantuan kendaraan roda tiga Pemerintah untuk Kabupaten/Kota/ Kecamatan/ kelurahan dan Desa ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi.
- f. Pemberian dana bantuan transfer Program Samisake ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Program ini memiliki beberapa kegiatan yang terdiri dari :

- a. Bedah rumah;
- b. Beasiswa;
- c. Sertifikat tanah gratis;
- d. Pengadaan kendaraan roda 3;
- e. Pengadaan alat Mesin Pertanian;
- f. Penguatan UMKM;
- g. Kegiatan prioritas lainnya.



Alokasi dana transfer sebagaimana yang dijelaskan diatas dialokasikan untuk kegiatan :

- a. Bedah rumah maksimal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per unit rumah yang dibedah untuk membiayai pembelian bahan/ material bangunan, upah tenaga kerja dan pajak;
- b. Beasiswa masing-masing untuk siswa SD atau sederajat maksimal sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) persiswa, siswa SMP atau sederajat maksimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) persiswa, siswa SMA/SMK atau sederajat maksimal sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) persiswa dan Mahasiswa maksimal sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) permahasiswa.
- c. Penerbitan Sertifikat gratis maksimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per persil;
- d. Pengadaan roda tiga maksimal sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) unit;
- e. Penguatan Modal Bagi UMKM maksimal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) KK dengan jenis bantuan dapat berupa uang dan/atau sarana/ peralatan usaha;
- f. Bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) dengan nilai maksimal Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) perunit bagi Kelompok Masyarakat.



Penyaluran dana transfer untuk program Samisake Tahun 2012 dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jambi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/ Kota penerima. Penyaluran Dana Transfer dilakukan secara bertahap sebagai berikut :

- a. Tahap I (pertama) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total dana yang akan ditransfer;
- b. Tahap II (kedua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari total dana yang akan ditransfer;
- c. Tahap III (ketiga) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total dana yang akan ditransfer.

Penyaluran tahap I (pertama) dilaksanakan setelah peraturan daerah mengenai APBD mencantumkan penerimaan Dana transfer diterima oleh Kepala Biro Keuangan Provinsi Jambi, serta melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Program SAMISAKE sesuai dengan format sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II a Peraturan Gubernur Jambi. Penyaluran tahap II dan tahap III dilaksanakan setelah penyerapan anggaran tahap I dan tahap II telah mencapai minimal 75%.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena dilihat dari aspek masalah yang diangkat pendekatan kualitatiflah yang dapat digunakan karena penelitian kualitatif menyajikan bentuk yang menyeluruh dalam menganalisis fenomena. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai “penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Perspektif, strategi, dan model yang dikembangkan sangat beragam” Baswori dan Suwandi (2008:20).

Hal ini senada dengan pendapat tersebut, Kirk dan Miller (dalam Baswori dan Suwandi, 2008) mendefinisikan “bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahnya”

Penggunaan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif diasumsikan lebih mendukung dan memberikan penjelasan dalam memahami permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Moleong (2014: 6) yang menyatakan bahwa :

“Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistic dan rumit. Definisi



ini lebih melihat perspektif emik dalam penelitian yaitu memandang sesuatu upaya membangun pandangan subjek penelitian yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistic dan rumit?!

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka peneliti mengumpulkan data dan informasi untuk mendeskripsikan, mengungkapkan fakta tentang suatu obyek, menggambarkan dan menginterpretasikan serta pengambilan suatu kesimpulan dari penelitian tentang Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 Untuk Kegiatan Bedah Rumah.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif terdapat fokus penelitian yang disebut dengan batasan masalah. Penetapan fokus penelitian bertujuan untuk mempermudah peneliti menentukan keputusan yang tepat mengenai data mana yang perlu tidak perlu digunakan atau data mana yang perlu dibuang. Menurut Moloeng (2014:94) bahwa penetapan fokus penelitian kualitatif memiliki dua tujuan yaitu : Pertama, membatasi studi agar fokus tidak melebar dan jamak. Kedua, penetapan fokus lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus. Dengan dasar pemahaman tersebut dan rumusan masalah yang ditetapkan, maka fokus penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan



(Samisake) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 pada kegiatan Bedah Rumah, dengan menggunakan teori Gridle :

1) *Content of Policy*

a. Kepentingan kelompok sasaran

Kepentingan kelompok sasaran disini dimaksudkan kepada masyarakat penerima bantuan kegiatan bedah rumah.

b. Tipe manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari program pada kegiatan bedah rumah ini adalah untuk pemerataan rumah layak huni di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

c. Derajat perubahan yang diinginkan

Derajat perubahan yang ingin dicapai merupakan analisis berkenaan dengan target disusunnya program Bedah Rumah yang ditertera dalam Pergub

a. Letak pengambilan keputusan

Pada program ini pengambilan keputusan dilakukan oleh Gubernur dan Bupati. Dalam hal ini Bupati menetapkan calon penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Pergub Nomor 14 tahun 2012.



b. Pelaksanaan program

Pelaksana pada program ini yaitu Dinas Pekerjaan Umum, dibantu dengan Camat pada tingkat kecamatan sebagai penyusun rencana kegiatan program SAMISAKE.

c. Sumberdaya yang dilibatkan

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program Bedah Rumah ini terdiri dari Sarjana Penggerak Pedesaan yang membantu pengadministrasian pihak kecamatan, Camat, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, dan BAPPEDA.

2) *Context of Policy*

a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat

Kekuasaan, kepentingan serta strategi dari Gubernur khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan BAPPEDA terkait dengan program bedah rumah.

b. Karakteristik lembaga dan penguasa

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini akan dijelaskan karakteristik dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dan BAPPEDA dalam mempengaruhi suatu kebijakan.

c. Kepatuhan dan daya tanggap

Pada poin ini berbicara mengenai sejauh mana kepatuhan Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan program bedah rumah sesuai dengan Petunjuk Teknis yang telah disusun oleh SKPD tersebut, dalam hal ini yang dimaksud yaitu terkait jumlah anggaran dana yang telah ditetapkan sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2012.

3) *Impact*

a. Dampak terhadap masyarakat, perseorangan dan kelompok

b. Tingkat perubahan dan penerimaan



C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah tempat dimana penelitian mendapatkan data-data informasi secara aktual dan factual untuk keperluan penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini, peneliti nantinya menangkap keadaan dari objek yang diteliti. Pada penelitian ini peneliti memilih Provinsi Jambi sebagai lokasi penelitian.

Kemudian, situs penelitian berkaitan dengan tempat dimana peneliti dapat mengumpulkan data berdasarkan fenomena yang sebenarnya terjadi berdasarkan obyek yang diteliti. Adapun yang menjadi situs penelitian adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi selaku pelaksana program bedah rumah tersebut, dan tokoh masyarakat penerima bantuan rumah layak huni.

D. Jenis dan Sumber Data

Setiap peneliti agar mempunyai hasil yang baik sesuai dengan yang dikehendaki dalam penelitiannya, tentu harus ditunjang oleh data yang relevan, baik jumlah maupun jenis data yang diperlukan. Sedangkan data-data tersebut terus digali dan diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Untuk memperoleh hasil yang baik tentunya harus ditunjang data yang akurat sesuai dengan yang dikehendaki (Fatikhatul, 2014: 48). Dalam hal ini peneliti mengambil dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diperoleh data dari dua sumber yakni data primer dan data sekunder



1. Data primer

Data primer merupakan data-data yang diperoleh peneliti secara langsung terhadap objek yang diteliti dan dikumpulkan melalui proses wawancara dengan responden atau informan terkait Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2012 pada program bedah rumah, sumber data primer ini dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video atau audio, pengambilan foto atau film.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang mencakup informasi yang dikumpulkan dan relevan terhadap masalah yang diteliti. Data sekunder ini bersifat sebagai data penunjang yang terdiri dari dokumen-dokumen, laporan, jurnal, serta publikasi yang bersifat periodik. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi dari sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dan arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi (Moleong, 2014).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan penggunaan metode dalam pengumpulan data sebuah penelitian. Hal ini penting karena yang menentukan berhasil atau tidak suatu data penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data terdiri dari :



1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan dua orang atau lebih dimana salah satu bertindak sebagai pewawancara dan lainnya bertindak sebagai narasumber. Dengan teknik wawancara ini peneliti akan mendapatkan informasi lebih mendalam kepada orang-orang yang ahli atau orang-orang yang sebagai subyek mengenai fenomena atau permasalahan yang dikaji.

2. Observasi

Observasi menurut Hadi (dalam Baswori dan Suwandis, 2008) merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi langsung adalah mengamati perilaku seseorang atau obyek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada saat peristiwa, keadaan, atau situasi tersebut terjadi. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi terhadap program bedah rumah di Provinsi Jambi.

Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan melihat dan terjun langsung dalam pengamatan dilapangan. Pengamatan atau observasi dilapangan dilakukan dengan melihat fenomena dan keadaan yang diteliti dalam hal ini kondisi rumah masyarakat. Kondisi permukiman dan perumahan warga masyarakat setelah program bedah rumah berjalan dan apakah sudah terealisasi sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2012.



3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dimana mengumpulkan dokumen atau literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat mendukung argumentasi atau pendapat peneliti. Dokumentasi ini juga berfungsi sebagai pendukung dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam. Dokumentasi yang digunakan bisa berupa catatan, foto dan rekaman yang menggunakan *tape recorder*.

Pengumpulan data dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mengumpulkan dokumen seperti Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 sebagai dasar hukum dari program bedah rumah. Data dokumentasi tersebut digunakan sebagai bahan informasi dan referensi mengenai pelaksanaan program bedah rumah di kecamatan Provinsi Jambi. Dengan adanya dokumen tersebut, dapat menjadi acuan untuk mengukur kebenaran informasi dari narasumber sekaligus dapat memperkuat argumen atau pendapat dari peneliti berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti. Dokumen tersebut terbagi ke dalam data primer yaitu berupa catatan wawancara peneliti dan rekaman wawancara peneliti dengan narasumber, dan data sekunder yaitu dokumen-dokumen resmi atau dokumen administrasi mengenai program bedah rumah yang di dapatkan dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi.



F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat ukur yang digunakan dalam memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun instrument penelitian yang digunakan adalah :

1. Peneliti sendiri, dengan penelitian kualitatif peneliti menjadi instrumen penting dalam proses penelitian, dimana peneliti terjun langsung dalam proses pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data dan menarik kesimpulan dari penelitian. Peneliti melihat langsung fenomena berbagai data dari observasi, wawancara hingga dokumentasi, kemudian peneliti melakukan pemilihan data yang dinilai cukup relevan dan menggambarkan keadaan yang semestinya sehingga dapat menarik suatu kesimpulan berdasarkan fenomena dan data-data tersebut.
2. Pedoman wawancara, pedoman digunakan sebagai pemandu dalam proses wawancara agar wawancara dapat terarah dan dapat menghasilkan informasi yang mendalam mengenai permasalahan yang dikaji. Pedoman wawancara dibuat dengan berdasarkan fokus penelitian yang diangkat oleh peneliti. Dimana pertanyaan-pertanyaan yang dianut dalam pedoman wawancara sekiranya harus bisa menjawab atau menggambarkan fokus penelitian.
3. Perangkat penunjang, alat penunjang yang meliputi buku catatan lapangan dan alat tulis menulis, yang berfungsi dalam mencatat fenomena yang dilihat, dirasakan, dan dialami oleh peneliti.



G. Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang penting dalam proses penelitian. Dalam analisis data peneliti hanya melakukan pengecekan kesesuaian data dan rekaman pada saat wawancara dari informan yang didapatkan, dan juga melakukan melacak kesesuaian segenap hasil penelitian dimana data disesuaikan dengan apa yang ada dilapangan disaat peneliti melakukan peninjauan lapangan. Sehingga peneliti dapat melakukan pencocokan dengan data lapangan dan juga data dari informan hasil wawancara yang didapatkan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif. Sejalan dengan analisis interaktif yang dimaksud, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, factual, dan akurat. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) dalam Zuhurfia (2016:66) di dalam analisis data kualitatif terdapat empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan proses mencari dan mengumpulkan data dengan teknik yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dari sumber-sumber data yang sesuai dengan kebutuhan data fokus penelitian. Terkait implementasi peraturan gubernur no. 14 tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (Samisake) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 untuk kegiatan bedah rumah bentuk pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta dokumentasi.



2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan kesimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.

4. Menarik Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan "final" mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Provinsi Jambi

a. Letak Geografis



Sumber : - Peta Rupabumi Indonesia, BIG - Permenagri Nomor 56 Tahun 2015

Gambar 4.1 Peta Provinsi Jambi

Sumber : Google



Provinsi Jambi secara geografis terletak antara $0^{\circ} 45'$ sampai $2^{\circ} 45'$ lintang selatan dan antara $101^{\circ} 10'$ sampai $104^{\circ} 55'$ bujur timur. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Luas Wilayah Provinsi Jambi 53.435 Km^2 dengan luas daratan $50.160,05 \text{ Km}^2$ dan luas perairan sebesar $3.274,95 \text{ Km}^2$

terdiri dari :

- Kabupaten Kerinci $3.355,27 \text{ Km}^2$ (6,69%)
- Kabupaten Merangin 7.679 Km^2 (15,31%)
- Kabupaten Sarolangun 6.184 Km^2 (12,33%)
- Kabupaten Batanghari 5.804 Km^2 (11,57%)
- Kabupaten Muaro Jambi 5.326 Km^2 (10,62%)
- Kabupaten Tanjung Jabung Timur 5.445 Km^2 (10,86%)
- Kabupaten Tanjung Jabung Barat $4.649,85 \text{ Km}^2$ (9,27%)

b. Luas Wilayah

Luas wilayah terbesar di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin sebesar 7.679 Km^2 atau sebesar 15,31 persen dari total luas wilayah Provinsi Jambi, diikuti oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing-masing sebesar 6.461 Km^2 dan 6.184 Km^2 . Secara administratif, jumlah kecamatan dan desa/kelurahan di Provinsi Jambi tahun 2014 sebanyak 138 kecamatan dan 1.551 desa/kelurahan, dimana jumlah kecamatan terbanyak berada di Kabupaten Merangin yaitu 24



kecamatan, sedangkan jumlah desa/kelurahan terbanyak berada di Kabupaten Kerinci yaitu 287 desa/kelurahan.

Provinsi Jambi terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota. Terdapat 138 kecamatan, 1.388 desa dan 163 kelurahan yang tersebar di kabupaten dan kota dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kerinci terdiri dari 16 kecamatan, 285 desa dan 2 kelurahan.
- b. Merangin terdiri dari 24 kecamatan, 205 desa dan 10 kelurahan
- c. Sarolangun terdiri dari 10 kecamatan, 149 desa dan 9 kelurahan
- d. Batang Hari terdiri dari 8 kecamatan, 100 desa dan 13 kelurahan
- e. Muaro Jambi terdiri dari 11 kecamatan, 150 desa dan 5 kelurahan
- f. Tanjung Jabung Timur terdiri dari 11 kecamatan, 73 desa dan 20 kelurahan
- g. Tanjung Jabung Barat terdiri dari 13 kecamatan, 114 desa dan 20 kelurahan
- h. Tebo terdiri dari 12 kecamatan, 107 desa dan 5 kelurahan
- i. Bungo terdiri dari 17 kecamatan, 141 desa dan 12 kelurahan
- j. Kota Jambi terdiri dari 8 kecamatan dan 62 kelurahan.
- k. Kota Sungai Penuh terdiri dari 8 kecamatan, 64 desa dan 4 kelurahan.

Table 4.1 Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2014

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan
1.	Kerinci	16	286	2	278



2.	Merangin	24	205	10	215
3.	Sarolangun	10	149	9	158
4.	Batang Hari	8	100	14	114
5.	Muaro Jambi	11	150	5	155
6.	Tanjab Timur	11	73	20	93
7.	Tanjab Barat	13	114	20	134
8.	Tebo	12	107	5	112
9.	Bungo	17	141	12	153
10.	Kota Jambi	8		62	62
11.	Kota Sungai Penuh	8	64	4	68
JUMLAH/Total 2014		138	1.388	163	1.551

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Jambi tahun 2014 sebanyak 3.344.421 jiwa, pada tahun 2013 sebanyak 3.317.034. Selama kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan sebesar 0,83 persen. Kepadatan penduduk tahun 2014 menurut Kabupaten/ Kota:

- Kabupaten Kerinci 72 orang/km²

- Kabupaten Merangin 47 orang/km²

- Kabupaten Sarolangun 44 orang/km²



- Kabupaten Batanghari 44 orang/km²

- Kabupaten Muaro Jambi 73 orang/km²

- Kabupaten Tanjung Jabung Timur 39 orang / km²

- Kabupaten Tanjung Jabung Barat 66 orang/km²

- Kabupaten Tebo 50 orang/km²

- Kabupaten Bungo 72 orang/km²

- Kota Jambi 2.765 orang/km²

- Kota Sungai Penuh 220 orang/km²

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Jambi keadaan Agustus tahun 2014

mencapai 1.570.822 orang yang terdiri dari 1.491.038 orang bekerja dan 79.784 orang pencari kerja/pengangguran. Jumlah pencari kerja yang mendaftar di dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2013 sebanyak 16.983 orang atau naik 30,75 persen dari tahun sebelumnya.

d. Pendapatan Daerah

Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi tahun anggaran 2013 mengalami peningkatan sebesar 8,4 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut salah satunya disumbangkan oleh peningkatan dari bagian sisa lebih anggaran tahun lalu sebesar 78,86 persen. Realisasi belanja daerah Pemerintah



Provinsi Jambi tahun anggaran 2013 dibanding tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 17,76 persen dengan rincian belanja aparatur daerah turun sebesar 26,81 persen, belanja pelayanan publik meningkat sebesar 75,70 persen.

Realisasi penerimaan pajak/ retribusi daerah yang dipungut melalui Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jambi tahun 2013 menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2012 yaitu sebesar 75 persen. Hasil pemungutan PBB menurut sektornya secara umum mengalami kenaikan. Di samping itu dalam subbab keuangan ini juga menyediakan data mengenai realisasi penerimaan PBB dan BPHTB masing-masing kabupaten/kota tahun 2013.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jambi Tahun 2014 Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 7,76 persen. Kenaikan ini merupakan pertumbuhan perekonomian secara riil dimana faktor inflasi/deflasi sudah dihilangkan. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum memiliki laju pertumbuhan tertinggi sebesar 18,73 persen, disusul oleh sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 15,10 persen, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 13,38 persen, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 13,22 persen, sektor konstruksi 9,52 persen, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 8,80 persen, sektor pengadaan listrik dan gas 8,60 persen, dan terendah sektor jasa pendidikan sebesar 0,25 persen.



2. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi merupakan salah satu di antara beberapa dinas yang ada di Provinsi Jambi dan merupakan Instansi Pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sebagai bagian integral dari Pemerintah Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi sepenuhnya akan mendukung pemerintah Provinsi Jambi dalam menjalankan peran strategisnya, khususnya dalam pembangunan sarana dan prasarana melalui bidang sumber daya air, bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang perumahan, bagian sekretariat, bidang bina teknik dan tata ruang, UPTD jasa konstruksi, UPTD balai pengujian dan UPTD balai peralatan dan perbekalan.

Sebelum ditetapkannya Perda Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi masih bernama Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Jambi yang merupakan hasil pengintegrasian Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dan Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, yang organisasinya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Jambi.

a. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi, dijelaskan bahwa Dinas



Pekerjaan Umum Provinsi Jambi memiliki Struktur Organisasi yang terdiri atas Kepala Dinas, Bagian Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Perumahan, Bagian Sekretariat, Bidang Bina Teknik dan Tata Ruang, UPTD Balai Pengujian, UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan, UPTD Jasa Konstruksi dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam menjalankan tugasnya masing-masing bidang dibantu oleh 3 (tiga) seksi, yaitu :

Berdasarkan peraturan Gubernur nomor 30 tahun 2008 tentang Uraian Tupoksi Dinas Daerah Provinsi Jambi maka uraian tugas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan ketentuan sebagaimana tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada semua satuan organisasi Dinas Pekerjaan Umum serta menyiapkan bahan evaluasi kegiatan penyusunan program dan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan koordinasi, penyusunan program kerja, pengumpulan dan pengelolaan data serta laporan
 - b. Melakukan pengelolaan urusan perencanaan, umum dan perlengkapan.



- c. Melakukan pengelolaan urusan kepegawaian.
- d. Melakukan pengelolaan urusan keuangan.
- e. Melakukan pengelolaan urusan hukum dan tata laksana.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Bidang Bina Teknik dan Tata Ruang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang pembinaan teknik dan penataan ruang dalam wilayah provinsi Jambi.

Untuk melaksanakan tugas di atas Bidang Bina Teknik dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi tata ruang dalam wilayah dalam provinsi;
- b. Melaksanakan pembinaan teknik , pengendalian mutu pekerjaan dan penelitian di bidang Pekerjaan Umum dalam wilayah provinsi;
- c. Melaksanakan pengawasan teknik dan evaluasi pekerjaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum

4. Bidang Sumber Daya Air, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum di bidang sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas diatas, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum di bidang sumber daya air sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam Provinsi Jambi;



- b. Melaksanakan penyusunan program dan anggaran serta evaluasi kinerja dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air;
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang sumber daya air meliputi irigasi, rawa, pantai, sungai, danau, waduk dan bendungan, termasuk penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah;
- d. Melaksanakan pengaturan pengelolaan sumber daya air;
- e. Melakukan pembinaan dan bantuan teknis pengelolaan, konservasi dan pemeliharaan serta evaluasi di bidang sumber daya air;
- f. Melaksanakan pengembangan sistem pembiayaan di bidang sumber daya air;
- g. Memfasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelola di bidang sumber daya air;
- h. Melaksanakan urusan administrasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan di bidang sumber daya air.

5. Bidang Bina Marga, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang bina marga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Gubernur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas di atas Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana teknis dan program kegiatan di bidang bina marga dalam wilayah Provinsi Jambi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- b. Melakukan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang bina marga;
- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pekerjaan bidang bina marga dalam wilayah Provinsi Jambi;
- d. Melakukan penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- e. Melakukan penyusunan laporan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- f. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga bidang bina marga.

6. Bidang Cipta Karya, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi di bidang ke-Cipta Karya dalam wilayah Provinsi Jambi.

Untuk melaksanakan tugas di atas Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

- a. Membina dan menyusun program di bidang permukiman;
- b. Membina dan menyusun program tata bangunan dan lingkungan;
- c. Membina dan menyusun program air minum dan sanitasi dan penyehatan lingkungan permukiman (PLP).

7. Bidang Perumahan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang perumahan.

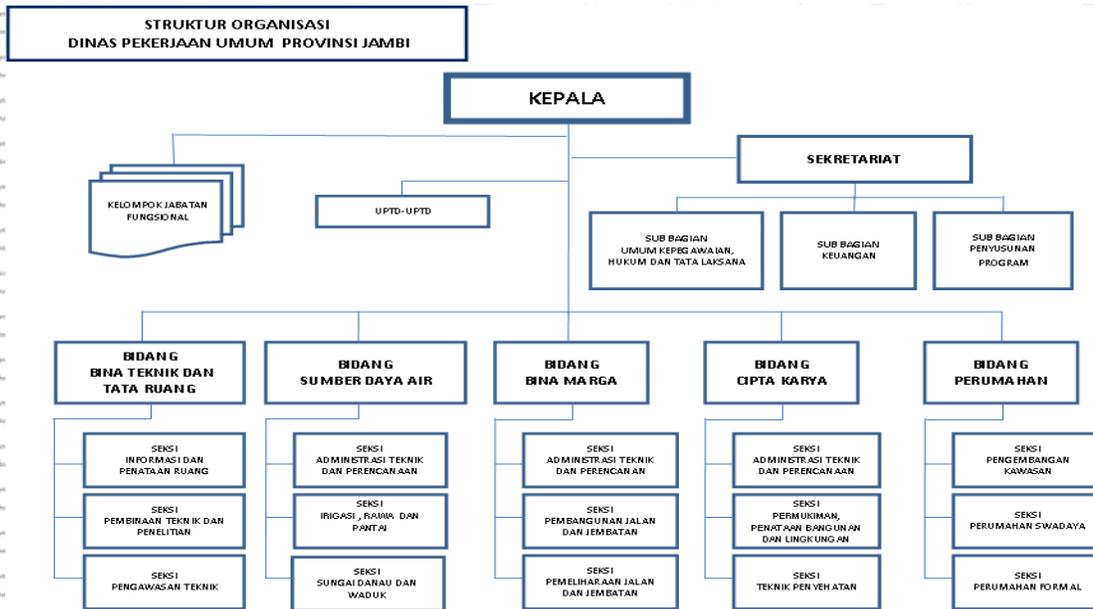
Untuk melaksanakan tugas di atas Bidang Perumahan mempunyai fungsi:

- a. Membina dan menyusun program di bidang Perumahan;
- b. Membina dan menyusun program pengembangan kawasan perumahan swadaya;



c. Membina dan menyusun program pengembangan kawasan perumahan formal.

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi
 Sumber : Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi tahun 2010-2015

b. Tugas dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum;

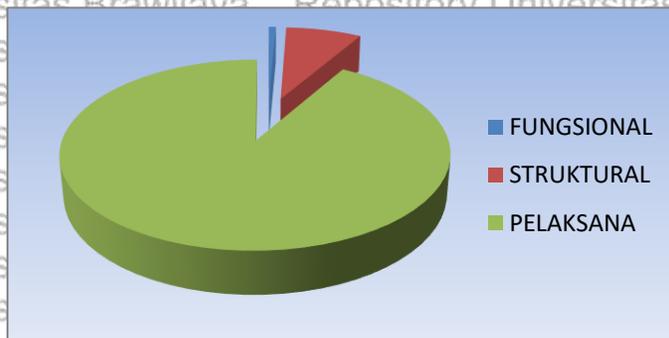


- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sumber Daya SKPD

Dalam Melaksanakan tugas Pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum mempunyai SDM sebanyak 419 pegawai yang terdiri atas:

Pejabat Struktural	:	32 orang
Pejabat Fungsional	:	3 orang
Pelaksana	:	384 orang



Gambar 4.3 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Prov. Jambi Berdasarkan Jabatan
Sumber : Renja Dinas PU tahun 2010-2015

Untuk Aset yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Rincian umumnya adalah sebagai berikut :

- Aset Tetap senilai Rp. 2.633.802.857.157,- yaitu berupa :
- Peralatan dan Mesin Rp. 84.858.640.557,-



- Gedung dan Bangunan Rp. 55.178.600.336,-
 - Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp. 2.493.765.616.264,-
 - Aset Lainnya senilai Rp. 463.212.420.024,- berupa :
 - Aset Tidak Berwujud Rp. 136.650.000,-
 - Aset Lain-lain Rp. 463.075.770.024,-
- Total Dana Aset yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi adalah Rp. 3.097.015.277.181,- .

d. Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi telah melakukan pencapaian- pencapaian. Dalam kurun waktu 2006 – 2010 Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang juga menjadi prioritas bagi Provinsi Jambi. Program dan kegiatan tersebut antara lain adalah :

1) Bidang Sumber Daya Air

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.

a) Kegiatan Pembangunan Daerah Irigasi Semabu total dana sebesar

Rp. 25.635.597.000 dengan target penyelesaian daerah irigasi seluas 504

Ha yang terdiri dari bendung bagian bawah, bendung bagian tengah,

bendung bagian atas, saluran primer, saluran sekunder dan bangunan

pelengkap lainnya. Untuk TA. 2010 untuk penyelesaian saluran primer

dan bangunan pelengkap masih dalam tahap pelaksanaan.



b) Peningkatan Tanggul Mekarsari Kab. Ma. Jambi dengan total dana Rp. 24.699.676.000 dengan target penyelesaian sepanjang 21.500 m. Telah selesai dilaksanakan sampai dengan TA. 2009

2) Bidang Bina Marga

a) Jalan Bangko - Bts. Kerinci – Sanggaran Agung – Sei. Penuh

b) Total dana Rp. 146.221.241.410 dan dengan target sepanjang 72.6 KM.

c) Jalan Batanghari II- Sp. Niaso – Ds. Baru – Bts. Tanjab – Zona Lima (Sp. Pelabi)

Total dana Rp. 127.547.780.000 dengan target sepanjang 77,7 Km.

a) Jalan Sp. Lagan – Zona Lima/Sp. Pelabi – Ma. Sabak – Dermaga

Total dana Rp. 53.907.765.000 target sepanjang 31 Km.

b) Jalan Sp. Tuan – Pematang Lumut – Ka. Tungkal

Total Dana Rp. 63.653.839.490 target sepanjang 51 Km.

c) Pembangunan Jembatan

Total dana Rp. 166.413.620.000 yaitu Jembatan Batanghari II (1.351 M),

Jembatan Sei. Baung (150 M'), Jembatan Tanjung Batu (22 M'),

Jembatan Sei. Jambi Kecil/Niaso (25 M'), Jembatan Rangka Baja Sungai

Seregam Desa Hajran (60 M'), Jembatan A. Muthalib (135 M'), Jembatan

Parit Gompong (135 M'), Jembatan Danau Lamo (40 M'), Jembatan Ds.

Kilangan (48 M'), Jembatan Ds. Sei. Ruan (48 M'), Jembatan Rangka

Baja Pramuka (120 M'), Jembatan Pulau Rengas (360 M'), Jembatan



Pancasila (60 M²), Jembatan Sri Agung (60 M²), Jembatan Pangkal Bulihan (180 M²), Jembatan Pematang Jering (30 M²).

3) Bidang Cipta Karya

a) Program Pembangunan Gedung Kantor Kegiatan Rehab Total Gedung Dekranasda Jambi 1 unit dengan dana Rp. 6.393.853.000

b) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Kegiatan Pembangunan Asrama Putra/Putri Kwarda Jambi 1 unit dengan dana Rp. 2.561.544.000

c) Program Pembangunan Gedung Kantor Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi 4 unit dengan dana Rp. 17.112.649.000

d) Rehab Gedung Kantor PKK Provinsi Jambi 1 unit dengan dana Rp. 1.450.000.000

4) Bidang Perumahan

Program Pengembangan Perumahan :

a) Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan 4.501 M² dengan dana Rp. 2.276.759.968

b) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat 18.005 M² dengan Rp. 9.107.039.872

c) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Swadaya 90.023 M² dengan Rp. 45.535.199.360.



B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Isi Kebijakan

a. Kepentingan kelompok sasaran

Suatu kebijakan dalam pelaksanaannya akan melibatkan banyak kepentingan dan sejauh mana kepentingan tersebut dapat berpengaruh terhadap implementasi tersebut. Kepentingan tersebut yaitu berasal dari masyarakat sekitar, pemerintah Provinsi Jambi, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi. Kegiatan bedah rumah ini dijalankan sesuai dengan kepentingan yang dibutuhkan oleh suatu daerah. Kepentingan Kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 pada Kegiatan Bedah Rumah, sebagaimana telah dijelaskan pada Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 pada BAB I Pasal 1 yang isinya Program SAMISAKE dimaksudkan untuk membantu mendukung percepatan pembangunan daerah yaitu pemerataan pembangunan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, membantu meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna mengatasi kesenjangan fiskal Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembangunan, membantu Kabupaten/Kota dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran,



membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang tidak tersedia dan atau kurang alokasi dananya.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Riswandi sebagai staff pada bidang bina marga, beliau mengatakan :

“kebijakan ini khususnya pada kegiatan bedah rumah dibuat untuk pemerataan rumah layak huni di provinsi jambi, dan juga terdapat kepentingan politik pada kebijakan tersebut merupakan janji politik dari calon gubernur yang sekarang telah menjabat sebagai gubernur provinsi jambi” (wawancara dilakukan pada 21 Februari 2017 pukul 10.00)

Sesuai hasil wawancara dapat dinyatakan bahwa bukan hanya kepentingan untuk masyarakat saja yang dalam terbentuknya kebijakan tersebut, kepentingan politik juga terdapat di dalamnya yaitu merupakan janji politik pada masa kampanye yang dilakukan oleh calon gubernur Hasan Basri

Agus dan Fachrori Umar yang kemudian terpilih menjadi gubernur Provinsi Jambi.

Pasal 2

Sasaran Penerima Program Samisake adalah:

- a. Kepala Keluarga (KK) sangat miskin beserta anggota keluarganya sesuai dengan data base hasil verifikasi Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2011;
- b. KK sangat miskin di luar data base hasil verifikasi Bappeda Provinsi Jambi tahun 2011, dengan ketentuan apabila semua KK sangat miskin hasil verifikasi Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2011 telah terakomodir seluruhnya;
- c. sasaran penerima seperti yang dimaksud pada huruf b diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah diketahui Camat dan disertai data pendukung antara lain : foto rumah, foto KK yang bersangkutan, data status tanah, data pelayanan kesehatan, pekerjaan dan data pendidikan anak;
- d. bantuan program SAMISAKE diberikan kepada Kepala Keluarga sangat miskin beserta keluarganya secara berkelompok sesuai dengan petunjuk teknis.
- e. Penerima bantuan kendaraan roda tiga Pemerintah untuk Kabupaten/Kota /Kecamatan/Kelurahan dan Desa ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi
- f. Pemberian dana bantuan transfer Program SAMISAKE ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Gambar 4.4 Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2012

Sumber : Data diolah Peneliti



Seperti yang tertera pada gambar di atas, pada pasal 2 dijelaskan sasaran penerima program SAMISAKE khususnya untuk kegiatan bedah rumah yaitu kepada masyarakat miskin. Data keluarga miskin di dapatkan dari database pada tahun 2011. Sasaran penerima bantuan tersebut diusulkan oleh kepala desa yang diketahui oleh camat.

b. Tipe manfaat

Tipe of Benefit suatu kebijakan diharapkan dapat memberikan manfaat yang bersifat kolektif kepada semua masyarakat luas, sehingga implementasi kebijakan akan mendapatkan dukungan penuh dari kelompok sasaran yaitu masyarakat itu sendiri. Kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 Pada Kegiatan Bedah Rumah ini memiliki berbagai manfaat yang dihasilkan.

Tipe manfaat yang dapat dihasilkan dari kegiatan bedah rumah adalah adanya pemerataan rumah layak huni di provinsi Jambi. Menurut Kepala bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Bapak Sandi mengatakan,

“dalam rangka mengurangi pertumbuhan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin di perdesaan maupun diperkotaan, Pemerintah Provinsi Jambi meluncurkan program yang dirancang untuk pemerataan pembangunan peningkatan kualitas hidup Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) diseluruh Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.” (wawancara dilakukan pada 13 Februari 2017 pukul 10.00)



Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA TRANSFER PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN (SAMISAKE) PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I
RUANG LINGKUP
Pasal 1

- (1) Dana transfer untuk Program Samisake dimaksudkan untuk membantu mendukung percepatan pembangunan daerah yaitu pemerataan pembangunan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, membantu meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna mengatasi kesenjangan fiskal Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembangunan, membantu Kabupaten/Kota dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang tidak tersedia dan atau kurang alokasi dananya.
- (2) Dana transfer ke Kabupaten/Kota untuk Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) adalah bagian dari Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dalam APBD Provinsi Jambi Tahun 2012.

Gambar 4.5 Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2012

Sumber : Data diolah Penulis

Dijelaskan pula pada peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012, untuk membantu mendukung percepatan pembangunan daerah yaitu pemerataan pembangunan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, membantu meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna mengatasi kesenjangan fiskal Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembangunan, membantu Kabupaten/Kota dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang tidak tersedia dan atau kurang alokasi dananya.

c. Derajat perubahan yang diinginkan

Suatu kebijakan tentu dibuat dengan harapan bahwa kebijakan yang telah dibuat memberikan dampak perubahan menuju arah yang lebih baik.



Perubahan yang diharapkan memberikan efek baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Kebijakan peraturan Gubernur No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 Pada Kegiatan Bedah Rumah diharapkan memberikan perubahan untuk pembangunan di Provinsi Jambi.

Sasaran dari kegiatan bedah rumah ini adalah rumah yang tidak layak huni. Dari rumah yang sebelumnya berlantai tanah kemudian menjadi lantai semen. Sasaran dari kegiatan bedah rumah ini juga dijelaskan oleh Sandi Selaku Kepala bidang Bina Marga, beliau mengatakan:

“sasaran dari kegiatan bedah rumah ini yaitu rumah yang tidak layak huni contohnya lantainya masih tanah, kurangnya jendela sehingga rumah tersebut kurang mendapatkan oksigen yang bagus dikarenakan pergantian udaranya yang minim, sesuai dengan kriteria rumah layak huni kita melaksanakan kegiatan bedah rumah ini”. (wawancara dilakukan 13 Februari 2017 pukul 10.00 WIB)

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan bedah rumah tersebut memiliki sasaran yaitu kepada rumah yang tidak layak huni. Perubahan yang diinginkan sesuai dengan kriteria rumah layak huni yaitu contohnya rumah tidak lagi berlantai tanah menjadi lantai semen, ada pencahayaan dan ventilasi udara yang cukup. Berikut merupakan perubahan rumah yang sebelum dibedah dengan rumah yang telah dibedah:



Gambar 4.6 Rumah Sebelum dibedah
Sumber : Dokumentasi Dnas PU



Gambar 4.7 Rumah Setelah dibedah
Sumber : Dokumentasi Dinas PU



Gambar 4.8 Rumah Sebelum dibedah
Sumber : Dokumentasi Dinas PU



Gambar 4.9 Rumah Setelah dibedah
Sumber : Dokumentasi Dinas PU



Gambar 4.10 Rumah Sebelum dibedah
Sumber : Dokumentasi Dinas PU



Gambar 4.11 Rumah Setelah dibedah
Sumber : Dokumentasi Dinas PU



Dapat dijelaskan dari gambar diatas yaitu rumah warga penerima bantuan bedah rumah yang sebelumnya berlantai tanah menjadi lantai semen.

Tidak hanya itu saja atap rumah yang sebelumnya terbuat dari daun dirubah menjadi atap seng. Perubahan ini tentunya sangat memberikan dampak positif bagi penghuni rumah tersebut.

d. Letak pengambilan keputusan

Site of decision making tentu melibatkan beberapa instansi yang ada, dalam hal ini terdapat dua instansi yang berkedudukan dalam kebijakan Peraturan Gubernur No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 Pada Kegiatan Bedah Rumah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi. Dijelaskan pula oleh Bapak Riswandi selaku staff pada bidang bina marga, mengatakan :

“perumusan Pergub tersebut dilaksanakan oleh BAPEDDA, yang juga terdapat didalam RPJMDnya pada tahun 2010-2015.” (wawancara dilakukan pada 20 Februari 2017 pukul 10.00 WIB)

Sesuai hasil wawancara terhadap beliau didapatkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi sebagai pembuat kebijakan mikro menjalankan perumusan untuk meningkatkan pembangunan yang telah tertera dalam RPJMD tahun 2010-2015 yang didalamnya terdapat program SAMISAKE.



Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi sebagai pelaksana program (*program implementator*), Dinas pekerjaan umum sebagai SKPD terkait dalam menjalankan program tentu selalu meningkatkan kemampuan dan daya dukung dilapangan dalam menjalankan kegiatan bedah rumah.

Dalam pelaksanaan kegiatan bedah rumah yang disesuaikan oleh Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum tahun 2010-2015, Bidang Bina Marga sendiri mempunyai tugas dalam menjalankan berbagai program bedah rumah. Oleh Bapak Sandi sebagai Kepala bidang Bina Marga mengatakan :

“Bidang Bina Marga mempunyai tugas dalam melaksanakan kebijakan yang berasal dari perumusan BAPPEDA. Pelaksanaan program ini dilakukan dari seksi yang ada dalam bidang bina marga.” (wawancara dilakukan pada 13 Februari 2017 pada pukul 10.00 WIB)

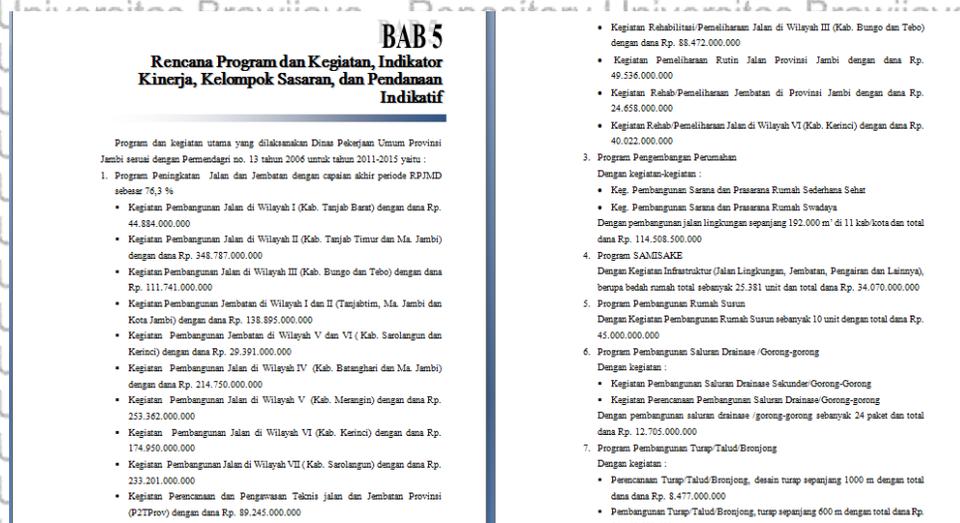
Sesuai dengan apa yang telah didapatkan dari hasil wawancara, Badan perencanaan pembangunan daerah provinsi Jambi memiliki peran sebagai merumuskan kebijakan serta mengevaluasi program tersebut. Sedangkan dinas pekerjaan umum provinsi Jambi bertugas sebagai pelaksana dari kegiatan bedah rumah.

e. Pelaksanaan Program

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi sebagai pelaksana program perlu adanya dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan agar tingkat keberhasilan kebijakan tersebut dapat tercapai dengan maksimal. Dalam hal



ini Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Pelaksana dalam implementasi Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 pada kegiatan bedah rumah tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berperan sebagai penyusun kebijakan mikro, sebagai *leading sector* pada pengimplementasian seluruh program SAMISAKE yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu beasiswa, sertifikat tanah gratis, pengadaan kendaraan roda 3, pengadaan alat mesin pertanian, penguatan UMKM, dan juga termasuk bedah rumah. Pelaksana dalam kegiatan bedah rumah ini adalah Dinas Pekerjaan Umum selaku instansi pemerintah sebagai eksekutor terhadap kegiatan bedah rumah tersebut.



Gambar 4.12 Renstra Dinas PU Tahun 2010

Sumber : Diolah Penulis



Hal tersebut tertera di dalam Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi tahun 2010-2015. Penjelasan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi melaksanakan beberapa program salah satunya yaitu SAMISAKE pada kegiatan bedah rumah. Seperti pada gambar di atas pada poin ke 4 (empat) dijelaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan bedah rumah sebanyak 25.381 unit.

f. Sumberdaya yang dilibatkan

Peralatan, sarana dan prasarana adalah sebuah media untuk mendukung jalannya suatu kebijakan program. Adanya sumberdaya manusia yang berkualitas tanpa didukung oleh suatu alat atau media, maka suatu kebijakan atau program tidak akan bisa terlaksana. Dijelaskan oleh Bapak Sandi sebagai Kepala bidang Bina Marga mengatakan:

“Program SAMISAKE ini khususnya kegiatan bedah rumah sumber dana itu bersumber dari dana APBD tahun anggaran 2012, tidak hanya bersumber dari dana APBD pelaksanaan kegiatan bedah rumah ini juga di support oleh CSR dengan memberikan bantuan dana untuk kegiatan bedah rumah.” (wawancara dilakukan pada 13 Februari 2017 pukul 10.00 WIB)

Sesuai hasil wawancara yang didapat bahwa dari kemampuan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan bedah rumah memiliki beberapa sumber dana yaitu dana yang berasal dari APBD tahun 2012 dan juga dana bantuan yang diberikan oleh CSR.

Dalam implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu



Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012

Pada Kegiatan bedah rumah, beberapa aktor utama (*stakeholder*) yang terlibat diantaranya masyarakat setempat yang juga berpartisipasi membantu dalam merenovasi rumahnya maupun rumah kerabatnya, perangkat kecamatan bertugas mendata warga miskin yang berhak mendapatkan bantuan bedah rumah dengan syarat dan ketentuan sesuai yang tertera dalam Pergub, Dinas

Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, dan juga CSR. Dejelaskan juga oleh Bapak Sandi selaku Kepala Bidang Bina Marga bahwa:

“pada tahun 2010 kegiatan bedah rumah pada program SAMISAKE ini dijalankan oleh TNI” (wawancara dilakukan pada 13 februari 2017 pukul 10.00 WIB)

Sesuai dengan wawancara yang di dapatkan, pada tahun 2010 kegiatan bedah rumah pada program SAMISAKE tersebut dilaksanakan oleh TNI, pada tahun selanjutnya barulah kegiatan bedah rumah diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum.

2. Konteks Implementasi

a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

Strategi, sumber dan posisi implementator akan sangat menentukan tingkat keberhasilan kebijakan yang diimplementasikan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi sebagai *stakeholder* yang terlibat mempunyai strategi sendiri dalam



melaksanakan kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2012, tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 Pada Kegiatan Bedah Rumah.

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi selaku instansi di bawah naungan pemerintah daerah yang mempunyai peran sebagai pelaksana kegiatan bedah rumah pada program SAMISAKE tentunya memiliki strategi dalam melaksanakan kegiatan bedah rumah agar berjalan sesuai dengan pedoman umum yang telah dijelaskan di dalam Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012. Dijelaskan oleh Bapak Sandi selaku Kepala Bidang Bina Marga, bahwa

“dana dari APBD untuk Program SAMISAKE akan langsung ditransfer kepada Bupati” (wawancara dilakukan pada 13 Februari 2017 pukul 13.00)

Strategi yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan bedah rumah adalah dengan mentransfer dana untuk kegiatan bedah rumah tersebut kepada kabupaten/kota di Provinsi Jambi, lalu dana tersebut akan di kelola langsung oleh Bupati dan langsung di berikan kepada camat di Kecamatan yang berada pada kabupaten/kota.



b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa

Melihat karakteristik suatu lembaga dalam berhasilnya implementasi kebijakan dapat dilihat dari visi misi lembaga yang memiliki kekuasaan terhadap kebijakan tersebut. Program yang dijalankan tentu dengan kerjasama yang baik dari setiap *stakeholder* terlibat tanpa menimbulkan konflik sesuai dengan target dan tujuan masing-masing lembaga.

Badan perencanaan pembangunan daerah provinsi Jambi dalam hal ini memiliki karakteristik sebagai penyusun, evaluasi dan perencanaan dalam Peraturan Gubernur nomor 14 tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012. Sebagai penyusun kebijakan makro tersebut, dapat dilihat dari visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, seperti yang dijelaskan pada profil yaitu “MEWUJUDKAN LEMBAGA PERENCANA YANG HANDAL, KREDIBEL DAN PROAKTIF UNTUK MENCAPAI JAMBI EMAS”, penjelasan dari visi tersebut adalah proses perencanaan pembangunan daerah harus melibatkan para pelaku pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata handal, kredibel dan proaktif adalah sebagai berikut:



Handal : Mampu melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.

Kredibel : Menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, yang meliputi antara lain transparansi, taat hukum, partisipatif, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Proaktif : Antisipatif dan aktif dalam turut menentukan arah tujuan pembangunan daerah, serta mampu dengan cepat menyelesaikan dan atau memberikan kontribusi secara signifikan dalam penyelesaian permasalahan pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan visi tersebut dilaksanakan melalui misi-misi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas aparatur dan lembaga perencanaan.
- b) Menyusun rencana pembangunan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan.
- c) Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- d) Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah.
- e) Melakukan pembinaan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya pada pelaksanaannya, karakter yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi yang bertugas sebagai pelaksana dalam



kebijakan tersebut, dapat dilihat dari visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, seperti yang telah dijelaskan pada profil Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi. Visi : **TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR YANG Mendukung pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan Jambi Emas.** Untuk mewujudkan visi tersebut, berikut adalah misi-misi yang akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan prasaranan jalan.
 2. Mewujudkan pola pengelolaan sumber daya air (SDA) yang terpadu, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
 3. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur permukiman yang handal untuk peningkatan kualitas kehidupan.
 4. Meningkatkan kinerja dan kualitas pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi.
- c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana Implementator harus memiliki kepekaan dan respon yang cepat terhadap kebijakan yang dijalankan. Pada pelaksanaan implementasi Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (Samisake) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Namun pada kenyataannya, ada beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan bedah rumah tersebut, karena dalam setiap



kegiatan pastinya selalu saja ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang telah di tetapkan sebelumnya.

Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Sandi Kepala Bidang Bina Marga dinas pekerjaan umum provinsi Jambi :

“dalam pelaksanaan kegiatan bedah rumah ada beberapa hal yang kenyataannya tidak sesuai dengan Pedum yang telah di buat, yaitu dana yang ditetapkan untuk pembedahan satu rumah yaitu Rp. 10.000.000,00, tetapi pada kenyataannya dana tersebut kurang, itu bisa dikarenakan susah nya akses untuk memasuki suatu desa hingga membutuhkan biaya yang lebih” (wawancara dilakukan pada 13 Februari 2017 pukul 10.00 WIB)

Dari penjelasan Bapak Sandi selaku koordinator pelaksana program SAMISAKE, dana yang diberikan pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan bedah rumah tidak terlalu cukup untuk membedah satu rumah, perlu juga melihat lokasi dimana letak rumah yang akan di bedah tersebut, karena tidak semua daerah yang berada di Provinsi Jambi memiliki infrastruktur yang memadai.

Penerima kegiatan bedah rumah ini diperuntukan bagi masyarakat yang kurang mampu, pelaksanaan kegiatan bedah rumah ini sesuai dengan data yang telah dikumpulkan siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan bedah rumah. Berikut merupakan contoh laporan data masyarakat sangat miskin :



LAPORAN DATA DAN ALAMAT RUMAH TANGGA MASYARAKAT SANGAT MISKIN

PROVINSI : JAMBI KABUPATEN/KOTA : KAB. BATANG HARI KECAMATAN : BAJUBANG KELURAHAN : BAJUBANG
 RTRW : 0101 NOMOR : LRG/GANG : KUALI PECAH

NO. KTP : 474.4/659/2009	JUMLAH ANAK SEKOLAH				STATUS RUMAH : 3 (Menumpang)
NAMA KEPALA KELUARGA : MAT SARI	SD	SMP	SLT	SF	KEADAAN RUMAH : 1 (Lantai tanah/Bambu/Kayu kualitas rendah)
NAMA ISTRU/SUAMI : ESA					PEKERJAAN KK : 1 (Petani)
UNTUK ANAK USIA SEKOLAH/KESEHATAN					KEMAMPUAN BEROBAT : 2 (Tidak)
NO	NAMA	KELAS	A.L.A.M.A.T	JAMKESDA	JAMKESMAS
1.					
2.					
3.					
CATATAN DAN SARAN : 1. JENIS LANTAI BANGUNAN TEMPAT TINGGAL TERBUAT DARI KAYU 2. JENIS DINDING TERBUAT DARI KAYU BERKUALITAS RENDAH 3. SUMBER PENCAHAYAIAN RUMAH TANGGA NYAMUNG LISTRIK, TETANNGGA 4. SUMBER AIR MINUM DARI SUMUR 5. BAHAN BAKAR UNTUK MEMASAK SETIAP HARI ADALAH KAYU BAKAR 6. HANYA MEMBELI SATU STEL BAJU BARU DALAM SETAHUN 7. PERKODIRAN TERTINGGI KEPALA RUMAH TANGGA HANYA SD 8. TIDAK PUNYA TANAH DAN TINGGAL DI KEKUN ORANG LAIN					

PHOTO:

MAT SARI

Ker : tanda (**) dibelakang nama merupakan data tambahan

Gambar 4.13 Laporan Data dan Alamat Rumah Tangga Masyarakat Sangat Miskin
 Sumber : Data Dokumentasi Dinas PU

LAPORAN DATA DAN ALAMAT RUMAH TANGGA MASYARAKAT SANGAT MISKIN

PROVINSI : JAMBI KABUPATEN/KOTA : KAB. BATANG HARI KECAMATAN : BAJUBANG KELURAHAN : BATIN
 RTRW : 09 NOMOR : LRG/GANG : DS. MERBAU A

NO. KTP : 474.4/5608/2010	JUMLAH ANAK SEKOLAH				STATUS RUMAH : 3 (Menumpang)
NAMA KEPALA KELUARGA : SITI JUWARIAH	SD	SMP	SLT	SF	KEADAAN RUMAH : 2 (Atap nipah/seng/genteng)
NAMA ISTRU/SUAMI : AMIRUDIN (ALM)	1				PEKERJAAN KK : 2 (Buruh)
UNTUK ANAK USIA SEKOLAH/KESEHATAN					KEMAMPUAN BEROBAT : 2 (Tidak)
NO	NAMA	KELAS	A.L.A.M.A.T	JAMKESDA	JAMKESMAS
1.	SITI ROMLAH	6	SD 134 MERBAU		DAPAT
2.					
3.					
CATATAN DAN SARAN : 1. JENIS LANTAI BANGUNAN TEMPAT TINGGAL TERBUAT DARI KAYU 2. JENIS DINDING TERBUAT DARI KAYU BERKUALITAS RENDAH 3. SUMBER PENCAHAYAIAN RUMAH TANGGA NYAMUNG LISTRIK, TETANNGGA 4. SUMBER AIR MINUM DARI SUMUR 5. BAHAN BAKAR UNTUK MEMASAK SETIAP HARI ADALAH KAYU BAKAR 6. HANYA MEMBELI SATU STEL BAJU BARU DALAM SETAHUN 7. PERKODIRAN TERTINGGI KEPALA RUMAH TANGGA HANYA SD 8. ADA TANAH DI TEMPAT LAIN					

PHOTO:

Ker : tanda (**) dibelakang nama merupakan data tambahan

Gambar 4.14 Laporan Data dan Alamat Rumah Tangga Masyarakat Sangat Miskin
 Sumber : Data Dokumentasi Dinas PU



3. Dampak Kebijakan (*Impact Of Policy*)

a. Dampak pada masyarakat, individu, dan kelompok

Pada setiap kegiatan pastinya menimbulkan dampak, sebelum dilaksanakannya kegiatan tersebut atau sesudahnya. Dalam hal ini, masyarakat penerima bantuan yang merasakan dampak dari implementasi Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (Samisake) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 pada kegiatan bedah rumah. Bapak Rodiman warga penerima bantuan bedah rumah mengatakan:

“dengan adanya bantuan kegiatan bedah rumah dari Bapak Gubernur ini sangat membantu kita sebagai warga yang kurang mampu, khususnya yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak untuk huni, saya sebelumnya bekerja tidak menentu, kurang punya semangat untuk bekerja, saya merasa walaupun saya bekerja juga tidak akan merubah keuangan keluarga apalagi untuk membenahi rumah yang kadang atapnya bocor, setelah rumah saya sudah bagus saya memiliki semangat yang lebih karena sudah memiliki rumah yang nyaman, anak saya juga belajar dirumah lebih nyaman, kesehatan kami sekeluarga juga lebih terjaga, dulunya sering terkena sakit kulit karena sehari-harinya berada di rumah yang berlantai tanah.”
(wawancara dilakukan pada 25 Februari 2017 pada pukul 13.00 WIB)

Sesuai hasil wawancara yang didapatkan bahwa kegiatan bedah rumah tersebut memberikan dampak yang positif dari warga yang menerima bantuan bedah rumah. Dari segi ekonomi masyarakat yang menerima bantuan bedah rumah adalah masyarakat yang kurang mampu, yang memiliki penghasilan dibawah rata-rata, tidak memiliki semangat untuk merubah kehidupannya menjadi



lebih baik lagi, hingga mempunyai semangat untuk bekerja untuk memperbaiki derajat hidupnya.

Dari segi kesehatan, rumah yang mereka tempati sebelum dilakukan bedah rumah hanya berlantai tanah yang menyebabkan berbagai penyakit kulit menyerang mereka. Dengan adanya bantuan bedah rumah ini mereka hampir tidak pernah mengalami penyakit seperti pada saat rumahnya berlantainya tanah.

Dalam segi kesehatan sangat memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat yang menerima bantuan bedah rumah.

Dari segi pendidikan, dampak adanya kegiatan bedah rumah ini juga memiliki dampak yang positif yaitu anak-anak lebih memiliki tempat belajar yang nyaman di rumah dan juga memiliki semangat belajar yang tinggi sehingga hal tersebut dapat meningkatkan prestasi anak-anak di sekolah mereka.

b) Perubahan dan penerimaan masyarakat.

Rumah tidak layak huni merupakan suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Pada umumnya rumah tidak layak huni erat kaitannya dengan pemukiman kumuh karena pada dasarnya di daerah permukiman kumuh tergambar kemiskinan masyarakat.

Masalah rumah tidak layak huni ini terjadi karena kondisi ekonomi masyarakat yang tidak mampu untuk membangun sebuah hunian yang layak huni.

Kemiskinan merupakan salah satu penyebab terdapatnya rumah tidak layak huni di suatu daerah. Dengan adanya kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun



2012 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012. Pada Kegiatan Bedah Rumah dalam rangka meningkatkan pemerataan rumah layak huni, diharapkan adanya perubahan yang berarti dalam permasalahan rumah tidak layak huni.

Perubahan yang telah terjadi dengan adanya kebijakan ini adalah berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi Jambi. Oleh Bapak Sandi sebagai Kepala Bidang Perumahan Rakyat mengatakan:

“kegiatan bedah rumah ini memiliki target sebanyak 3.400 unit rumah, tetapi pada saat dilapangannya ternyata target tersebut tidak tercapai semuanya, hanya terealisasi sebanyak 3.100 unit rumah”

Sesuai hasil wawancara yang telah didapatkan bahwa adanya perubahan yang terjadi. Terlihat dari jumlah rumah yang telah dibedah. Dari 3.897 unit rumah target yang telah ditetapkan, sebanyak 3.759 telah terealisasi, setidaknya sebanyak 3.100 rumah tidak layak huni telah dibedah menjadi rumah layak huni. Tidak terwujudnya target yang telah ditetapkan tersebut disebabkan karena pada saat observasi ternyata pemilik rumah tersebut tidak memiliki surat-surat kepemilikan rumah tersebut, dan juga status penerima bantuan bedah rumah adalah menumpang, bukanlah pemilik dari rumah tersebut. Berikut merupakan tabel tentang jumlah rumah yang dibedah di setiap kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Jambi :



Tabel 4.2 Jumlah Kegiatan Bedah Rumah Tahun 2012

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kecamatan	Kegiatan Bedah Rumah	
			Target	Realisasi
1.	Tebo	8	401	375
2.	Merangin	18	995	978
3.	Bungo	13	719	719
4.	Tanjab Barat	9	306	302
5.	Tanjab Timur	9	306	305
6.	Sungai Penuh	3	201	196
7.	Kerinci	10	477	425
8.	Muaro Jambi	5	288	280
9.	Batanghari	2	68	53
10.	Sarolangun	4	136	126
JUMLAH		81	3.897	3.759

Sumber : Data diolah



C. Pembahasan Data Fokus Penelitian

1. Content of Policy (Isi Kebijakan)

a. Kepentingan Kelompok Sasaran

Melihat aspek dalam kurangnya pemerataan rumah layak huni di provinsi jambi, implementasi kebijakan peraturan gubernur nomor 14 tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 dapat dikatakan memiliki niat kebijakan yang sangat baik dalam kepentingannya. Dengan kepentingan yang telah disimpulkan pada penyajian data bahwa kebijakan ini memiliki kepentingan agar dapat terwujudnya pemerataan rumah layak huni di provinsi jambi dengan dana transfer ke kabupaten/kota yang ada di provinsi jambi. Sesuai dengan tujuan yang tercantum pada peraturan gubernur nomor 14 tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 yang telah dijelaskan pada penyajian data. Berkaitan dengan kepentingan itu juga, kebijakan ini berkaitan dengan definisi *sustainable development* yang



disampaikan dalam Hadi (2005:2) bahwa definisi kebijakan dengan pendekatan *sustainable development* ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Disimpulkan bahwa peraturan gubernur nomor 14 tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 pada kegiatan bedah rumah dalam perumusan yang telah dilakukan melihat kepentingan yang merujuk untuk masyarakat dalam pembangunan daerah untuk pemerataan rumah layak huni di Provinsi Jambi.

b. Tipe Manfaat

Terciptanya kebijakan peraturan gubernur nomor 14 tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan bedah rumah hingga ke seluruh kecamatan yang ada di Provinsi Jambi. Diharapkan dengan adanya kegiatan bedah rumah tersebut dapat membantu perubahan taraf hidup masyarakat yang mendapatkan bantuan bedah rumah dan juga mendapatkan kenyamanan dalam hidup dengan menempati rumah yang layak huni.

Dari penyajian data yang telah didapatkan melalui wawancara terhadap informan, didapatkan bahwa dengan adanya kebijakan ini, manfaat



yang dihasilkan beragam. Beberapa manfaat itu adalah dengan adanya kebijakan tersebut pada kegiatan bedah rumah kehidupan masyarakat yang mendapat bantuan lebih baik, meningkatnya semangat dalam mencari pekerjaan, mendapatkan kenyamanan dalam belajar di rumah. Selain itu aspek lingkungan nyaman dan sehat menjadi faktor utama tidak dilupakan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat yang mendapatkan bantuan bedah rumah tersebut.

c. Derajat Perubahan yang diinginkan

Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22 Tahun/Permen/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Dijelaskan pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 pasal 12 tentang Perencanaan dan Perancangan Rumah bahwa :

1. Perencanaan dan perancangan Rumah dilakukan untuk
 - a. Menciptakan rumah layak huni;
 - b. Mendukung upaya pemenuhan kebutuhan rumah oleh masyarakat dan pemerintah; dan
 - c. Meningkatkan tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur.



2. Perencanaan dan perancangan rumah untuk menciptakan rumah layak huni dilakukan dalam rangka mewujudkan rumah yang sehat, aman, dan teratur.

Dapat disimpulkan bahwa perubahan yang terjadi dari implementasi Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE)

Provinsi Jambi Pada Kegiatan Bedah dapat dikatakan berhasil. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22 Tahun/Permen/M/2008 Tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di atas pada kegiatan bedah rumah ini telah memenuhi kriteria rumah layak huni yaitu untuk mewujudkan rumah yang sehat aman dan teratur.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi sebagai penyusun kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 dan Dinas Pekerjaan Umum sebagai pelaksana kegiatan bedah rumah pada program tersebut telah menjalin komunikasi yang baik dalam pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dikatakan George C.Edward dalam Winarno (2012:177-221) bahwa pada salah satu faktor



yang akan mempengaruhi suatu implementasi kebijakan yaitu komunikasi.

Berkenan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi-organisasi dan publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap tanggap dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.

Dari apa yang telah dilakukan dari badan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jambi dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, adanya komunikasi yang baik mampu menjawab kedudukan dalam pengambilan suatu keputusan dari kebijakan yang telah ada. Sehingga implementasi kebijakan peraturan gubernur nomor 14 tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 pada Kegiatan Bedah Rumah tidak mengalami kesulitan dalam implementasinya baik secara geografis maupun organisatoris, dikarenakan hanya ada dua instansi terkait dalam kebijakan ini. Sehingga dalam kedudukan pengambilan keputusannya tidak mengalami permasalahan.

e. Pelaksanaan Program

Merilee S. Grindle (1980) dalam Nugroho (2009:509-515) mengatakan pelaksana program perlu adanya daya dukung dalam melaksanakan kebijakan. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi sebagai pelaksana kegiatan bedah rumah pada program SAMISAKE mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Sama dengan halnya dalam George



C.Edwards dalam Winarno (2012:177;211) salah satu faktor yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan adalah faktor Sumber daya atau *Reources*. Edward mengatakan bahwa khususnya sumber daya manusia, sarana prasarana dan sumber daya keuangan. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara efektif.

Adanya dukungan yang diberikan dari pihak masyarakat serta kecakapan setiap pegawai Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi mampu menjawab bahwa sebagai pelaksana program, dinas pekerjaan umum sudah melakukan hal yang terbaik. Terlihat dengan adanya jalinan kerjasama dengan warga sekitar rumah yang dibedah ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan bedah rumah yang dilaksanakan oleh dinas pekerjaan umum untuk menyukseskan dan mempercepat penyelesaian kegiatan bedah rumah.

f. Sumberdaya yang dilibatkan

Sesuai dengan apa yang telah dikatakan Merilee S. Grindle (1980) dalam Nugroho (2009:503-515) bahwa sumberdaya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, dengan sendirinya akan mempermudah pelaksanaannya. Dalam hal ini dinas pekerjaan umum provinsi Jambi dilihat dari motivasi kerja, loyalitas dan disiplin sumber daya manusia yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi terhadap pekerjaannya, dapat dikatakan cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari tingkat absensi kehadiran pegawai yang harus dilaksanakan melalui lembur



di luar jam kerja. Disamping itu dilihat dari kuantitas/jumlah sumber daya manusia pendukung pada Dinas Pekerjaan Umum dapat dikatakan cukup banyak dan memadai yaitu sebanyak 419 orang, yang terdiri dari 32 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional dan 384 orang sebagai pelaksana.

Permasalahan alokasi dana yang dibutuhkan Dinas Pekerjaan Umum sebagai unit kerja dengan tuntutan tugas dan fungsi utama yang sangat luas, menjadi sangat tidak berimbang antara tuntutan kinerja dengan kemampuan dasar organisasi, sehingga ini nampak hambatan yang sangat besar, bukan saja pada aspek operasional, namun juga pada mekanisme perencanaan pada tahun berikutnya.

Salah satu hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi adalah sarana teknologi yang menunjang sistem informasi, baik dalam rangka untuk mengakses informasi dari luar maupun dalam rangka penyampaian informasi yang bersifat promosi, ketersediaan sarana ini tentu saja akan sangat mendukung peningkatan kinerja organisasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi.

2. *Context of Policy*

a. Kekuasaan, kepentingan dan Strategi aktor yang terlibat

Merilee S. Grindle (1980) dalam Nugroho (2009:503-515) mengatakan bahwa strategi, sumber dan posisi kekuasaan implementor akan



menentukan tingkat keberhasilan kebijakan yang diimplementasikan.

Sejalan dengan hal itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Jambi dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi mempunyai strategi

dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2012

tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar

Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 pada

Kegiatan Bedah Rumah.

Badan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jambi sebagai

pihak yang memiliki kekuasaan dalam perumusan kebijakan tersebut,

menerapkan strategi dengan membuat rencana kerja atau bias disebut

RENJA. Maksud dari penyusunan Renja SKPD Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Jambi dengan tujuan memberikan arahan

sekaligus pedoman bagi Bappeda Provinsi Jambi dalam mewujudkan visi,

misi, tujuan dan sasaran SKPD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra

SKPD secara berkesinambungan. Dengan menyesuaikan hal itu juga,

strategi ini sesuai dengan apa yang dikatakan Soenarko (2005:187)

mengenai langkah-langkah dalam implementasi kebijakan ada salah satu

point penting yaitu *application*. *Application* itu sendiri adalah penerapan

segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-

kegiatan untuk terealisasinya tujuan suatu kegiatan.

Dilain pihak, dinas pekerjaan umum provinsi Jambi dalam

melaksanakan kebijakan peraturan gubernur nomor 14 tahun 2012 tentang



pedoman umum dan alokasi dana transfer program satu milyar satu kecamatan (SAMISAKE) provinsi Jambi tahun anggaran 2012 pada kegiatan bedah rumah, mempunyai Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk merencanakan program kerja yang akan dijalankan sesuai dengan kebijakan yang ada.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa badan perencanaan pemangunan daerah dan dinas pekerjaan umum provinsi Jambi dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 Pada Kegiatan Bedah Rumah mempunyai strategi yang sesuai dengan landasan hukum yang ada dalam menciptakan strategi unggulan melalui program-program utama yang berpengaruh kepada keberhasilan kebijakan tersebut. Tapi tetap dengan konsistensi yang harus selalu diterapkan manakala setiap RENJA maupun RENSTRA yang ada dapat dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab.

b. Karakteristik lembaga dan penguasa

Implementasi kebijakan berjalan baik atau tidak terpengaruh dari karakteristik suatu lembaga yang bersangkutan dengan kebijakan tersebut.

Karakteristik suatu lembaga dapat dinilai berdasarkan visi dan misi mereka sebagai implementor program maupun kebijakan. Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) dalam Nugroho (2009:503-515) menjelaskan bahwa



ada beberapa variable dalam implementasi kebijakan yang salah satunya adalah karakteristik agen pelaksana/implementator dimana variable ini akan mempengaruhi kebijakan publik.

Melihat visi dan misi badan perencanaan pembangunan daerah provinsi Jambi, serta Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi terlihat bahwa kedua SKPD yang terkait dengan kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 14

Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 Pada Kegiatan Bedah Rumah memiliki karakter yang

berbeda. Badan perencanaan pembangunan daerah provinsi Jambi memiliki karakter lebih sebagai penyusun, perencana, evaluasi dalam kebijakan mikro. Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi memiliki karakter

sebagai pelaksana, implementator dan tahap perencanaan program dalam kebijakan yang telah disusun oleh BAPPEDA Provinsi Jambi. Kedua lembaga ini memiliki peran dan fungsi yang berbeda, namun tetap pada satu

tujuan bahwa menciptakan tata ruang wilayah lingkungan hidup pada kawasan perkotaan.

Merilee S. Grindle (1980) dalam Nugroho (2009:503-515) mengatakan implementasi suatu program dapat menimbulkan konflik bagi kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi. Sesuai dengan hal itu

BAPPEDA Provinsi Jambi dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi melalui visi serta misi masing-masing mampu menjawab bahwa suatu



program dalam perencanaan tata ruang hijau kawasan perkotaan yang ada pada kebijakan-kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 Pada Kegiatan Bedah Rumah dapat berjalan dengan baik tanpa adanya konflik.

c. Kepatuhan Serta Daya Tanggap Pelaksana

Pelaksana kebijakan harus memiliki kepekaan terhadap kebutuhan-kebutuhan kelompok sasaran agar dalam implementasinya dapat berhasil. Dari apa yang telah dijabarkan dalam penyajian data oleh informan, Dinas Pekerjaan Umum provinsi Jambi sebagai dinas yang melaksanakan program kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 Pada Kegiatan Bedah Rumah memberikan kecakapan dalam bekerja baik dilapangan ataupun dilapangan secara langsung.

Hal ini dibuktikan dengan penyelesaian masalah di lapangan seperti susahnya bahan material didistribusikan ke tempat pelaksanaan bedah rumah, dan diselesaikan dengan cara bergotong royong untuk membawa material tersebut hingga sampai rumah yang akan dibedah. Kepekaan dan ketanggapan dalam melaksanakan suatu kebijakan akan memberikan dampak yang baik bagi kebijakan itu. Dengan daya tanggap yang dimiliki pegawai Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Dinas PU mendapaktakan



dukungan dari kelompok sasaran yaitu masyarakat sekitar rumah yang dibedah. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh George C.Edward dalam Winarno (2012:177-211) dalam salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah disposisi. Disposisi yang dimaksud adalah ketersediaan dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan public tersebut. Sikap yang baik atau positif para pelaksana terhadap suatu kebijakan menandakan suatu dukungan yang mendorong mereka menunaikan kewajiban sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan.

Dari apa yang telah dijelaskan bahwa ketanggapan dan kepekaan dari Dinas Pekerjaan Umum provinsi Jambi, implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 Pada Kegiatan Bedah Rumah dapat berjalan baik sehingga mendapatkan dukungan penuh dari setiap lapisan masyarakat Provinsi Jambi.

3. Dampak Implementasi

a. Dampak pada Masyarakat, Individu dan kelompok

Islamy (2009:20-21) mengemukakan beberapa elemen penting tentang kebijaksanaan negara yaitu:

- a) Bahwa kebijaksanaan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.



b) Bahwa kebijaksanaan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata

c) Bahwa kebijaksanaan negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.

d) Bahwa kebijaksanaan negara itu harus senantiasa ditunjukkan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Menyesuaikan dengan apa yang telah dijelaskan diatas bahwa suatu kebijakan senantiasa ditunjukkan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat. Kebijakan yang ada tentu akan memberikan dampak terhadap sasarannya yaitu masyarakat sendiri. Dalam hal ini Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 Pada Kegiatan Bedah Rumah telah memebrikan dampak yang baik terhadap masyarakat Provinsi Jambi. Dampak yang ada dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 Pada Kegiatan Bedah Rumah adalah menciptakan rumah yang layak huni.

Dari apa yang telah dibahas sesuai dengan penyajian data yang ada bahwa, kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu



Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 Pada Kegiatan Bedah Rumah, untuk saat ini memberikan dampak baik dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup bersih, nyaman, dan meningkatkan kualitas pendidikan.

b. Perubahan dan Penerimaan Masyarakat

Suatu kebijakan akan memberikan perubahan yang terjadi pada sasaran kebijakan, baik dari lingkungan ataupun masyarakat. Hal demikian sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Nicholas Henry dalam Islamy (2009:36-37) dalam salah satu model klasifikasi kebijaksanaan negara yang dianalisis dari sudut hasil dan akibat yaitu model teori rasionalisme yang dijelaskan oleh Yehezkel Dror, salah seorang penganut rasional-komprehensif. Melalui model ini sebuah proses rumusan kebijakan akan diprediksikan menjadi sebuah kebijakan yang nantinya akan memiliki tujuan-tujuan dan nilai-nilai sesuai dengan pentingnya sebuah masalah yang dialami.

Kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 Pada Kegiatan Bedah Rumah, seperti yang telah dijeaskan pada penyajian data bahwa kebijakan ini memberikan perubahan dalam bentuk rumah tidak layak huni kemudian dengan adanya kegiatan bedah rumah ini membuat rumah yang tidak layak huni tersebut menjadi rumah layak huni. Hal ini terlihat

dengan terlaksananya kegiatan bedah rumah sebanyak 3.100 unit dari 3.400 target yang telah di tetapkan.

Selain itu ada juga penerimaan yang ada dari masyarakat, bahwa mereka sangat antusias dengan adanya kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 Pada Kegiatan Bedah Rumah. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan bentuk kerjasama masyarakat dengan dinas pekerjaan umum provinsi Jambi yang sangat antusias dengan memberikan bantuan tenaga dalam pelaksanaan kegiatan bedah rumah di rumah warga yang menerima bantuan kegiatan bedah rumah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan beserta pembahasan sebelumnya, dari implementasi peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Tahun Anggaran 2012 Pada Kegiatan Bedah Rumah dapat dikatakan dalam implementasinya berjalan dengan baik. Hal tersebut terbukti dari context, content dan impact pada keijakan tersebut setelah penelitian. Berikut merupakan kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan teori Grindle :

a. *Content of Policy* (Isi Kebijakan)

a. Kepentingan kelompok sasaran

Melalui badan perencanaan pembangunan daerah sebagai penyusun kebijakan mikro, kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) tahun anggaran 2012 pada kegiatan bedah rumah, kebijakan tersebut dibuat agar terciptanya pemerataan rumah layak huni di provinsi jambi. Kebijakan tersebut juga dibuat dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Provinsi Jambi baik kesehatan maupun pendidikan.



b. Tipe Manfaat

Kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2012 tentang

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar

Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi tahun Anggaran 2012

pada kegiatan bedah rumah ini memberikan manfaat yang baik bagi

masyarakat Provinsi Jambi. Hal itu dibuktikan dengan adanya kegiatan

bedah rumah pada program SAMISAKE tersebut meratakan rumah

layak huni hingga ke desa-desa yang ada di Provinsi Jambi.

c. Derajat perubahan yang diinginkan

Kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2012 tentang

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar

Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi tahun Anggaran 2012

pada kegiatan bedah rumah ini dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut

diperkuat dengan terpenuhinya sarat rumah layak huni seperti yang

tertera di dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun/Permen/M/2008 Tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan pada Peraturan Gubernur Nomor 14

Tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer

Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi



Tahun Anggaran 2012 Pada Kegiatan Bedah Rumah sudah terbagi dan terstruktur dengan baik. Dimana badan perencanaan pembangunan daerah provinsi Jambi bertindak sebagai merencanakan, mengkoordinasi, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi. Selain itu dengan komunikasi yang baik kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi sebagai pelaksana kebijakan, maka dalam pengambilan keputusan tidak terjadi konflik baik dari segi geografi maupun organisator.

e. Pelaksanaan Program

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi sebagai pelaksana kegiatan bedah rumah, mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan pegawai kantor mereka sendiri. Hal ini terbukti masyarakat sekitar rumah yang dibedah ikut serta dalam pelaksanaan pembedahan rumah.

f. Sumber Daya yang dilibatkan

Sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan untuk menjalankan kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 pada Kegiatan Bedah Rumah dari segi perlengkapan sudah memadai. Namun masih ada kendala dalam keuangan, dimana dana yang diberikan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan



bedah rumah kurang cukup untuk membedah satu rumah, yang hanya dianggarkan Rp. 10.000.000,00 per unit rumah.

2. *Context of Policy*

a. Kekuasaan, kepentingan dan Strategi aktor yang terlibat

Keberhasilan kebijakan tentu dikarenakan pada strategi yang baik dalam melaksanakan kebijakan. Dalam melaksanakan kebijakan Peraturan

Gubernur Nomor 14 tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi

Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE)

Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 pada Kegiatan Bedah Rumah

memiliki strategi agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan

cepat yaitu dengan cara memberikan langsung dana kegiatan bedah rumah

kepada Bupati di Kabupaten dan langsung dikelola per kecamatan,

sehingga kecamatan bisa langsung melaksanakan kegiatan bedah rumah

dengan data penerima bantuan yang telah ditetapkan pula oleh pihak

kecamatan dan disetujui oleh Bupati masing-masing Kabupaten maupun

Kota.

b. Karakteristik lembaga dan penguasa

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi dan

Dinas Pekerjaan Umum memiliki karakter dan fungsi yang berbeda

terlihat dari visi dan misi masing-masing SKPD. Dalam kebijakan

Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2012 tentang Pedoman Umum

dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan



(SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 pada Kegiatan Bedah Rumah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi mempunyai karakter sebagai pelaku yang menyusun suatu kebijakan mikro tersebut. Untuk Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi mempunyai karakter sebagai pelaksana kebijakan yang telah dirumuskan oleh badan perencanaan dan pembangunan provinsi Jambi.

c. Kepatuhan serta daya tanggap

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi sebagai pelaksana kebijakan. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi melaksanakan kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 pada Kegiatan Bedah Rumah memberikan daya tanggap yang cepat. Terlihat dimana pelaksana kegiatan bedah rumah menyelesaikan pekerjaan dan juga menyelesaikan permasalahan yang ada dilapangan dengan cepat dan tanggap.

3. *Impact of Policy*

a. Dampak pada masyarakat, individu dan kelompok

Kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 pada



Kegiatan Bedah Rumah memberikan dampak yang positif kepada masyarakat yang ada di Provinsi Jambi. Terlihat dengan antusias salah satu warga penerima bantuan bedah rumah yang menyatakan dengan adanya kegiatan bedah rumah menambah semangat untuk mencari pekerjaan, meningkatnya semangat anak dalam belajar, mendapatkan kenyamanan dirumah, dan meningkatnya kesehatan lingkungan dirumah yang telah dilaksanakan bedah rumah.

b. Perubahan dan Penerimaan Masyarakat

Kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 pada Kegiatan Bedah Rumah memberikan perubahan yang baik. Hal ini dibuktikan dengan perubahan bentuk rumah sebelum dibedah yang tidak layak huni menjadi rumah layak huni.

Penerimaan masyarakat terkait kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 pada Kegiatan Bedah Rumah, sangat antusias. Dengan memiliki rumah yang layak huni lingkungan hidup menjadi lebih baik, maka kehidupan masyarakat menjadi nyaman. Masyarakat sangat menerima adanya kegiatan bedah rumah ini, masyarakat merasa sangat



terbantu dengan adanya kegiatan bedah rumah yang merupakan bagian dari program SAMISAKE.

B. Saran

Dari penjelasan yang diuraikan oleh peneliti, adapun saran dari hasil penelitian yang dapat peneliti kemukakan terhadap beberapa pihak diantaranya :

1. Agar dalam penyusunan Draf Pedoman Umum SAMISAKE juga melibatkan SKPD Teknis Tingkat Kecamatan, karena kecamatan merupakan lokasi tempat pelaksanaan program .
2. Program SAMISAKE terbukti memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sasaran (keluarga miskin), maka untuk kesinambungan program ini perlu di teruskan dan ditingkatkan pada masa yang akan datang.
3. Dana yang diberikan pemerintah untuk kegiatan bedah rumah perlu dipertimbangkan lagi pada program SAMISAKE selanjutnya, karena dana yang diberikan oleh pemerintah tidak cukup untuk membedah satu unit rumah.
4. Disarankan penelitian ini menjadi bahan masukan dan informasi bagi penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Merille S. Grindle, sehingga saran bagi peneliti selanjutnya adalah menggunakan model implementasi selain Merille S.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin 2008. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Ardaani, Zulfa. 2012. *Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Skripsi Malang : Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya.
- Baswori. Dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadi, Nor. 2011. *Coporate Social Responcibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hakim, EM. Lukman. 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jokjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kumalasari, Yesy Yusro. 2014. *Pembinaan dan Pemberdayaan Pengrajin Batik*. Skripsi Malang : Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya.
- Maghfiroh, Fatikhatul. 2014. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Rusunawa Gulomantung Kabupaten Gresik*. Skripsi Malang : Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya.
- Mardikanto dan Soebiato. 2012. *Pemberdayaan masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Maryam, Siti. 2016. *Implementasi Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Tahun 2013 di Kabupaten Bungo*. Skripsi Padang : Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Andalas.



Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya.

Nugroho, Riant. 2011. *Public policy dinamika kebijakan-analisis kebijakan-manajemen kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 tahun 2012 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi tahun Anggaran 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Prijono Onny S., & A.M. W. Pranaka, 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Center for Strategic and International Studies.

Subejo dan Supriyono. 2004. *Metodologi Pendekataan Pemberdayaan Masyarakat*, Short Paper Mata Kuliah Intensif Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Study On Rural Empowerment (SOREm)-Dewan Mahasiswa Fakultas Pertanian UGM tanggal 16 Mei 2004. [Online] <http://subejo.staff.ugm.ac.id/wpcontent/paper-bem-2004.pdf> [25 Mei 2017].

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Penerbit Alfabeta.

Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1985. *Percanaan Pembangunan*. Jakarta: PT GUNUNG AGUNG.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Zuhrufia, Dina. 2016. *Implementasi Kebijakan Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan Dalam Membangun Ekonomi Daerah*. Skripsi Malang : Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya.